



KATALOG BPS: 4102004.1107



2020

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ACEH BARAT**



2020

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT 2020

Katalog BPS : 4102004.1107

Nomor Publikasi : 11070.2105

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 84 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum:

Mughlisuddin, S.E.

Penyunting:

Hartato, S.S.T., M.E.K.K.

Penulis:

Hartato, S.S.T., M.E.K.K.

Pengolah Data:

Hartato, S.S.T., M.E.K.K.

Gambar Kulit:

Hartato, S.S.T., M.E.K.K.

<https://acebaratibooks.go.id>

KATA PENGANTAR

Kesejahteraan pada dasarnya mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan tidak semua aspek dapat diukur. Menyadari keterbatasan tersebut, publikasi ini hanya mencakup aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Bidang-bidang tersebut adalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan dan keadaan sosial ekonomi rumah tangga lainnya.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Barat 2020 merupakan publikasi yang menyajikan data tentang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020. Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 yang dilakukan di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kemajuan di masa yang akan datang. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna data.

Meulaboh, Mei 2021

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Aceh Barat

Mughlisuddin, SE

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
TIM PENYUSUN	<i>iii</i>
KATA PENGANTAR	<i>v</i>
DAFTAR ISI	<i>vii</i>
DAFTAR TABEL	<i>ix</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>x</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Sumber Data	5
2.2. Metode Pengumpulan Data	5
2.3. Metode Analisis	5
2.4. Konsep dan Definisi	6
BAB III KEPENDUDUKAN	13
3.1. Gambaran Kabupaten Aceh Barat Secara Umum	13
3.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	15
3.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	15
3.4. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan	17
3.5. Administrasi Kependudukan	19
BAB IV KETENAGAKERJAAN	23
4.1. Penduduk Usia Kerja	25
4.2. Angkatan Kerja	27
4.2.1 Kelompok Umur Angkatan Kerja	27
4.2.2 Angkatan Kerja dan Pendidikan	28
4.3. Bekerja	29
4.3.1 Kelompok Umur Penduduk Bekerja	29
4.3.2 Bekerja dan Pendidikan	30
4.3.3 Lapangan Usaha Penduduk Bekerja	31
4.3.4 Status Usaha Penduduk Bekerja	32
4.4. Pengangguran	33
BAB V KESEHATAN	35
5.1. Angka Kesakitan	36
5.2. Penolong Kelahiran	38
5.3. Pemberian ASI	40
5.4. Imunisasi	40
BAB VI PENDIDIKAN	43
6.1. Status Pendidikan	43
6.2. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	44

	6.3. Angka Buta Huruf	45
	6.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	46
	6.5. Angka Partisipasi Murni (APM)	46
BAB VII	KELUARGA BERENCANA	49
	7.1. Status Perkawinan	49
	7.1. Perkawinan Pertama	50
	7.3. Wanita Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin dan Alat/ Cara KB yang Digunakan	52
BAB VIII	PERUMAHAN	55
	8.1. Status Kepemilikan Rumah	55
	8.2. Luas Lantai	56
	8.3. Jenis Lantai, Dinding dan Atap Terluas	57
	8.4. Aset	58
	8.5. Energi	60
	8.5.1 Sumber Penerangan	60
	8.5.2 Bahan Bakar Memasak	61
	8.6. Sumber Air	61
	8.7. Tempat Buang Air Besar	64
BAB IX	KONSUMSI DAN PENGELUARAN	67
	9.1. Pengeluaran Konsumsi Kelompok Makanan	69
	9.2. Pengeluaran Konsumsi Kelompok Non Makanan	70
BAB X	KEMISKINAN	73
	10.1. Garis Kemiskinan	73
	10.2. Persentase Kemiskinan	75
BAB XI	SOSIAL EKONOMI LAINNYA	77
	11.1. Perlindungan Sosial	77
	11.1.1 Jaminan Kesehatan	77
	11.1.2 Jaminan Sosial	78
	11.1.3 Jaminan Pendidikan	79
	11.1.4 Kemudahan Pembiayaan	80
	11.2. Teknologi Informasi	81
	11.3. Kriminalitas	83

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel	3.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	13
Tabel	3.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Kabupaten Aceh Barat, 2020	15
Tabel	3.3. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, 2010-2020	16
Tabel	3.4. Persentase Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Aceh Barat, 2010-2020	19
Tabel	4.1. TPAK, TKK, dan TPT di Kabupaten Aceh Barat, 2020	24
Tabel	4.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Aceh Barat, 2020	26
Tabel	5.1. Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI, 2020	40
Tabel	6.1. Persentase Penduduk Umur 5 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	44
Tabel	6.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Aceh Barat, 2020	44
Tabel	6.3. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Baca/Tulis dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat, 2020	45
Tabel	6.4. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Barat, 2020	46
Tabel	6.5. Angka Partisipasi Murni Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Barat, 2020	47
Tabel	7.1. Persentase Penduduk 15-49 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	50
Tabel	11.1. Persentase Rumah Tangga yang ART-nya Menerima PIP Menurut Jenis PIP di Kabupaten Aceh Barat, 2020	79
Tabel	11.2. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Penggunaan Telepon Seluler/Nirkabel, Komputer, dan Internet di Kabupaten Aceh Barat, 2020	82

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Aceh Barat, 2020	18
Gambar 3.2. Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Aceh Barat, 2020	20
Gambar 4.1. Persentase Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Aceh Barat, 2020	25
Gambar 4.2. Piramida Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Barat, 2020	27
Gambar 4.3. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	28
Gambar 4.4. Piramida Penduduk Bekerja Kabupaten Aceh Barat, 2020	30
Gambar 4.5. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	31
Gambar 4.6. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Barat, 2020	32
Gambar 4.7. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Barat, 2020	33
Gambar 4.8. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	34
Gambar 5.1. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	36
Gambar 5.2. Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan yang Lalu Menurut Jumlah Hari Sakit di Kabupaten Aceh Barat, 2020	36
Gambar 5.3. Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri dan Berobat Jalan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	37
Gambar 5.4. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Berdasarkan Fasilitas Kesehatan yang Dikunjungi di Kabupaten Aceh Barat, 2020	37
Gambar 5.5. Persentase Penduduk yang Rawat Inap Menurut Tempat Rawat Inap di Kabupaten Aceh Barat, 2020	38
Gambar 5.6. Persentase Penduduk Menurut Banyaknya Hari Harus Dirawat Inap di Kabupaten Aceh Barat, 2020	38
Gambar 5.7. Persentase Penolong Persalinan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	39
Gambar 5.8. Persentase Tempat Kelahiran Persalinan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	39

Gambar 5.9.	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenisnya di Kabupaten Aceh Barat, 2020	41
Gambar 7.1.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Aceh Barat, 2020	51
Gambar 7.2.	Persentase Wanita Berusia 15 – 49 Tahun Berstatus Kawin dan Penggunaan Alat KB di Kabupaten Aceh Barat, 2020	52
Gambar 7.3.	Persentase Wanita Berusia 15 – 49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	53
Gambar 8.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Aceh Barat, 2020	56
Gambar 8.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai di Kabupaten Aceh Barat, 2020	57
Gambar 8.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah Perkapita di Kabupaten Aceh Barat, 2020	57
Gambar 8.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Aceh Barat, 2020	58
Gambar 8.5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Aceh Barat, 2020	58
Gambar 8.6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Aceh Barat, 2020	58
Gambar 8.7.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Aset Produktif di Kabupaten Aceh Barat, 2020	59
Gambar 8.8.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Aset Konsumtif di Kabupaten Aceh Barat, 2020	59
Gambar 8.9.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak di Kabupaten Aceh Barat, 2020	61
Gambar 8.10.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Aceh Barat, 2020	62
Gambar 8.11.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll di Kabupaten Aceh Barat, 2020	63
Gambar 8.12.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Sumur Bor/Pompa/Sumur/Mata Air Terlindung/Tak Terlindung Untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll Menurut Jarak Sumber Air Ke Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Kabupaten Aceh Barat, 2020	64
Gambar 8.13.	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Aceh Barat, 2020	65
Gambar 9.1.	Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	67
Gambar 9.2.	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Aceh Barat (Rupiah), 2020	68

Gambar 9.3.	Persentase Pengeluaran Perkapita Perbulan Komoditas Makanan Terpilih di Kabupaten Aceh Barat, 2016-2020	70
Gambar 9.4.	Persentase Pengeluaran Perkapita Perbulan Kelompok Pengeluaran Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Barat, 2016-2020	71
Gambar 10.1.	Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat (Rupiah), 2012-2020	74
Gambar 10.2.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat, 2012-2020	75
Gambar 11.1.	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera di Kabupaten Aceh Barat, 2020	77
Gambar 11.2.	Persentase Penduduk Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki di Kabupaten Aceh Barat, 2020	78
Gambar 11.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Jaminan Sosial yang Dimiliki di Kabupaten Aceh Barat, 2020	78
Gambar 11.4.	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Aceh Barat, 2020	80
Gambar 11.5.	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Aceh Barat, 2020	81
Gambar 11.6.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah dan Komputer/Laptop di Kabupaten Aceh Barat, 2020	82
Gambar 11.7.	Persentase Penduduk Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Kabupaten Aceh Barat, 2020	83

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini adalah masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercermin dari berbagai indikator, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan serta pendapatan masyarakat dan ketenagakerjaan.

Data sosial ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat sangat diperlukan untuk mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang menyangkut berbagai aspek pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesempatan kerja.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 menggambarkan data dan informasi mengenai tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun ulasan-ulasan singkat.

1.2. Tujuan

Secara umum pengumpulan data melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bertujuan untuk mendapatkan indikator-indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan rakyat atau tingkat sosial ekonomi masyarakat serta keadaan ketenagakerjaan.

Sasaran pengumpulan data pokok pada Susenas adalah tersedianya data tentang kesejahteraan rakyat, dimana sejak tahun 1992 data pokok

tersebut telah dapat disajikan tidak hanya sampai tingkat provinsi tapi juga sampai tingkat kabupaten/kota. Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan atau para peneliti di bidang sosial/kesejahteraan rakyat.

1.3. Ruang Lingkup

Kegiatan Susenas dan Sakernas 2020 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan pendekatan sampel rumah tangga. Sampel rumah tangga Susenas dan Sakernas di Kabupaten Aceh Barat tersebar di dua belas kecamatan. Rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus (seperti asrama, lembaga pemasyarakatan, panti asuhan) dan rumah tangga khusus yang tinggal dalam blok sensus biasa tidak dipillih dalam sampel.

Dalam kegiatan Susenas, seluruh rumah tangga sampel dicacah dengan menggunakan Daftar VSEN20.K yang berisi tentang keterangan rumah tangga dan anggota rumah tangga serta VSEN20.KP yang berisi tentang pengeluaran rumah tangga baik makanan maupun non makanan. Sementara itu, rumah tangga sampel dalam kegiatan Sakernas dicacah dengan menggunakan Daftar SAK20.AK untuk mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan. Data yang dihasilkan dari sampel Susenas dan Sakernas cukup representatif untuk disajikan hingga tingkat kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020, disajikan dalam 11 bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan,
2. Bab II Metodologi,
3. Bab III Kependudukan,
4. Bab IV Ketenagakerjaan,
5. Bab V Kesehatan,
6. Bab VI Pendidikan,
7. Bab VII Fertilitas dan Keluarga Berencana,

8. Bab VIII Perumahan,
9. Bab IX Konsumsi dan Pengeluaran,
10. Bab X Kemiskinan,
11. Bab XI Sosial Ekonomi Lainnya.

<https://acehbaratkab.bps.go.id>



BAB II METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Sumber data utama publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 di Kabupaten Aceh Barat.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Susenas dan Sakernas 2020 yang ditujukan pada individu perlu diusahakan agar individu yang bersangkutan dapat diwawancarai. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik yang ditanyakan.

2.3. Metode Analisis

Data yang dibahas dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Barat ini meliputi data kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas, perumahan, konsumsi, dan sosial ekonomi lainnya yang bersifat umum yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Analisis yang dilakukan mencoba memberikan gambaran umum tentang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 yang bersifat sederhana dan deskriptif terhadap tabel maupun grafik yang tersedia.

2.4. Konsep dan Definisi

a. Penduduk

Tingkat Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase.

Kepadatan Penduduk yaitu rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Rasio Jenis Kelamin adalah banyaknya laki-laki dari setiap 100 wanita.

Kepala Rumah Tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di rumah tangga tersebut.

Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada saat pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan akan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga. Orang yang telah tinggal di suatu rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang tinggal di suatu rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap di rumah tangga tersebut dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Kawin adalah mempunyai isteri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

Cerai hidup adalah berpisah sebagai suami/isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hidup

terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.

Cerai mati adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.

b. Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan, kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Mengobati sendiri adalah upaya oleh anggota rumah tangga/keluarga dengan melakukan pengobatan sendiri **tanpa** mendatangi fasilitas kesehatan atau memanggil dokter/petugas kesehatan ke rumahnya (misal minum obat modern, jamu, kerokan, kompres, pijat) agar sembuh atau menjadi lebih ringan keluhan kesehatannya.

Rawat jalan atau **berobat jalan** adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksa atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien.

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama sebulan sebelum pencacahan.

c. Pendidikan

Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di sekolah formal.

Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal baik pendidikan dasar, menengah maupun tinggi.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu rasio anak yang masih sekolah pada usia tertentu (usia sekolah) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sama.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah rasio anak yang masih sekolah di jenjang pendidikan tertentu pada usia sekolah tersebut terhadap jumlah penduduk usia normal untuk jenjang yang sama.

Angka Putus Sekolah adalah rasio jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas yang putus sekolah terhadap jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas.

Angka Melek Huruf yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis.

d. Fertilitas dan KB

Anak lahir hidup anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun mungkin hanya beberapa saat saja seperti jantung berdenyut, bernafas dan menangis. Anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan disebut **lahir mati**.

Metode kontrasepsi yaitu cara/alat pencegah kehamilan.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor) yaitu orang yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi.

Alat/cara KB adalah alat/cara yang digunakan pasangan suami istri untuk mencegah atau menunda kehamilan yang terdiri dari alat/cara KB modern dan tradisional.

Alat/cara KB modern meliputi Medis Operasi Wanita (MOW)/sterilisasi wanita/tubektomi, Medis Operasi Pria (MOP)/sterilisasi pria/vasektomi, AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)/IUD (*Intra Uterus Device*)/Spiral, Suntikan KB, Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit, Pil KB, Kondom/karet KB, dan Tissue Intravag/kondom wanita.

Alat/cara KB tradisional antara lain pantang berkala/sistem kalender, senggama putus, dan cara tradisional lainnya (tidak campur/puasa, jamu dan urut).

Medis Operasi Wanita (MOW)/sterilisasi wanita/tubektomi adalah operasi yang dilakukan pada wanita, yaitu mengikat saluran telur untuk mencegah terjadinya kehamilan dimaksudkan agar wanita tersebut tidak dapat mempunyai anak lagi. Operasi untuk mengambil rahim atau indung telur yang dilakukan karena alasan-alasan lain, bukan untuk mencegah wanita mempunyai anak lagi tidak termasuk sterilisasi.

Medis Operasi Pria (MOP)/sterilisasi pria/vasektomi adalah suatu operasi ringan yang dilakukan pada pria dengan maksud untuk mencegah terjadinya kehamilan pada pasangannya.

AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)/IUD (*Intra Uterus Device*)/Spiral adalah alat dibuat dari plastik halus/tembaga, berukuran kecil, berbentuk spiral, T, kipas dan lainnya, dipasang di dalam rahim untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Suntikan KB adalah salah satu cara pencegahan kehamilan dengan jalan menyuntikkan cairan tertentu ke dalam tubuh, misalnya satu, tiga, atau enam bulan sekali.

Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit (alat kontrasepsi bawah kulit) adalah enam batang logam kecil yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Pil KB adalah pil yang diminum untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pil ini harus diminum secara teratur setiap hari.

Kondom/karet KB adalah alat yang terbuat dari karet, berbentuk seperti balon, yang dipakai oleh laki-laki selama bersenggama dengan maksud agar istrinya/pasangannya tidak menjadi hamil.

Tissue Intravag/kondom wanita adalah tisu KB yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum kumpul.

e. Perumahan

Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak diperhitungkan sebagai luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung).

Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami di bawahnya dari teriknya matahari, hujan, dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.

Sumber air minum adalah sumber dari air yang digunakan untuk keperluan minum anggota rumah tangga.

Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum)

Air sumur terlindung adalah bila lingkaran mulut sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit setinggi 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut sumur.

Kloset leher angsa adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Plengsengan adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.

Cemplung/cubluk adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhir.

Lainnya adalah yang tidak mempunyai tempat untuk duduk/jongkok termasuk tidak mempunyai jamban/kakus.

f. Sosial lainnya

Pengeluaran adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang berupa makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

g. Ketenagakerjaan

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk berusia 15 tahun keatas.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok bekerja dan kelompok pengangguran.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam berturut-turut/tidak putus selama seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa/merasa tidak mungkin mendapatkan

pekerjaan (*discourage worker*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Angkatan kerja wanita, usia muda dan usia tua sering menjadi fokus dalam analisis pasar kerja di suatu negara atau wilayah, disamping mereka yang digolongkan sebagai angkatan kerja prima/utama (*prime age*), yaitu usia 25–54 tahun.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu negara atau wilayah. Tingkat kesempatan kerja diukur sebagai persentase penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.

BAB III KEPENDUDUKAN



3.1. Gambaran Kabupaten Aceh Barat Secara Umum

Kabupaten Aceh Barat secara geografis terletak diantara $04^{\circ}06'-04^{\circ}47'$ Lintang Utara dan $95^{\circ}52'-96^{\circ}30'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927,97 Km². Ibu kota kabupaten ini adalah Meulaboh yang terletak di Kecamatan Johan Pahlawan. Kecamatan terluas adalah Sungai Mas dengan proporsi 26,70 persen dari wilayah Aceh Barat, sedangkan kecamatan terkecil adalah Johan Pahlawan dengan proporsi 1,53 persen dari luas wilayah Aceh Barat.

Tabel 3.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, 2020

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Johan Pahlawan	44,91	1,53
Samatiga	140,69	4,81
Bubon	129,58	4,43
Arongan Lambalek	130,06	4,44
Woyla	249,04	8,51
Woyla Barat	123,00	4,20
Woyla Timur	132,60	4,53
Kaway XVI	510,80	17,42
Meureubo	112,87	3,85
Pante Ceureumen	490,25	16,74
Panton Reu	83,04	2,84
Sungai Mas	781,73	26,70
Aceh Barat	2.927,95	100,00

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie di sebelah utara dan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Indonesia di sebelah selatan. Sedangkan pada sebelah timur, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah. Sementara Samudera Indonesia membujur di sepanjang barat daerah ini.

Secara administrasi, Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan, 33 mukim dan 322 gampong. Kecamatan terdekat dari pusat kota Meulaboh adalah Meureubo, Samatiga, dan Kaway XVI. Sementara kecamatan terjauh adalah Woyla Timur, Pantou Reu, dan Sungai Mas.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan.

Jumlah/komposisi dan distribusi penduduk merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah. Tingginya laju pertumbuhan penduduk menggambarkan kuatnya tekanan terhadap kesejahteraan rumah tangga, yang pada akhirnya akan membebani tingkat perekonomian rumah tangga tersebut. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Ketersediaan data kependudukan yang berkualitas menentukan arah perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Dari segi perencanaan, data ini dapat menjadi dasar untuk menyusun program pembangunan guna memenuhi fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, misalnya fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan masyarakat, tempat ibadah, tempat rekreasi dan lainnya. Sedangkan dari segi evaluasi, data ini dapat menjadi gambaran sampai

sejauh mana program yang terkait dengan kependudukan sudah berjalan, seperti: Program Keluarga Berencana yang bertujuan untuk menekan/mengurangi jumlah kelahiran, Program Wajib Belajar maupun program lain yang berkaitan dengannya. Pada bagian ini, data kependudukan yang disajikan adalah data tentang jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran, kepadatan penduduk, dan komposisi penduduk menurut umur berdasarkan sensus penduduk di tahun 2020.

3.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat adalah 198.736 jiwa yang tersebar di dua belas kecamatan. Penduduk laki-laki berjumlah 100.492 jiwa dan perempuan 98.244 jiwa, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 102,30. Ini berarti penduduk laki-laki di Aceh Barat lebih banyak 2,30 persen dibandingkan penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 sebesar 1,32 persen (Tabel 3.2.).

Tabel 3.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Aceh Barat, 2020

Indikator	2020
(1)	(2)
Luas Wilayah (Km ²)	2.927,95
Jumlah Penduduk (jiwa)	198.736
- Laki-laki	100.492
- Perempuan	98.244
Rasio Jenis Kelamin	102,30
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,32

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

3.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk antar kecamatan terlihat masih belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terkonsentrasi di pusat perekonomian yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk. Masalah

yang sering timbul akibat kepadatan penduduk pada umumnya berhubungan dengan perumahan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, seperti memprioritaskan pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah yang masih terisolir dan kekurangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Hal ini sekaligus harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, 2010–2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	
	2010	2020	2010	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Johan Pahlawan	56.050	64.646	1.248	1.439
Samatiga	13.322	15.656	95	111
Bubon	6.545	6.817	51	53
Arongan Lambalek	10.609	11.871	82	91
Woyla	12.073	13.576	48	55
Woyla Barat	6.858	7.837	56	64
Woyla Timur	4.138	5.144	31	39
Kaway XVI	18.753	21.216	37	42
Meureubo	26.510	30.066	235	266
Pante Ceureumen	9.635	11.133	20	23
Panton Reu	5.671	6.856	68	79
Sungai Mas	3.394	4.188	4	5
Aceh Barat	173.558	198.736	59	68

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2010 dan 2020

Persebaran penduduk di Kabupaten Aceh Barat terkonsentrasi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo dan Samatiga dengan persentase masing-masing sebesar 32,53 persen, 15,13 persen, dan 7,88 persen.

Kecamatan yang paling sedikit penduduknya yaitu Kecamatan Sungai Mas dengan jumlah penduduk sebanyak 4.188 jiwa.

Kecamatan Johan Pahlawan yang luasnya hanya 44,91 km² (1,53 persen dari total luas Kabupaten Aceh Barat), merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk mencapai 1.439 jiwa per km² tahun 2020 dan 1.248 jiwa per km² pada tahun 2010. Kecamatan Sungai Mas merupakan daerah terjarang penduduknya dengan kepadatan penduduk 5 jiwa per km² pada tahun 2020 dan 4 jiwa per km² pada tahun 2010 (Tabel 3.3.).

3.4. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan

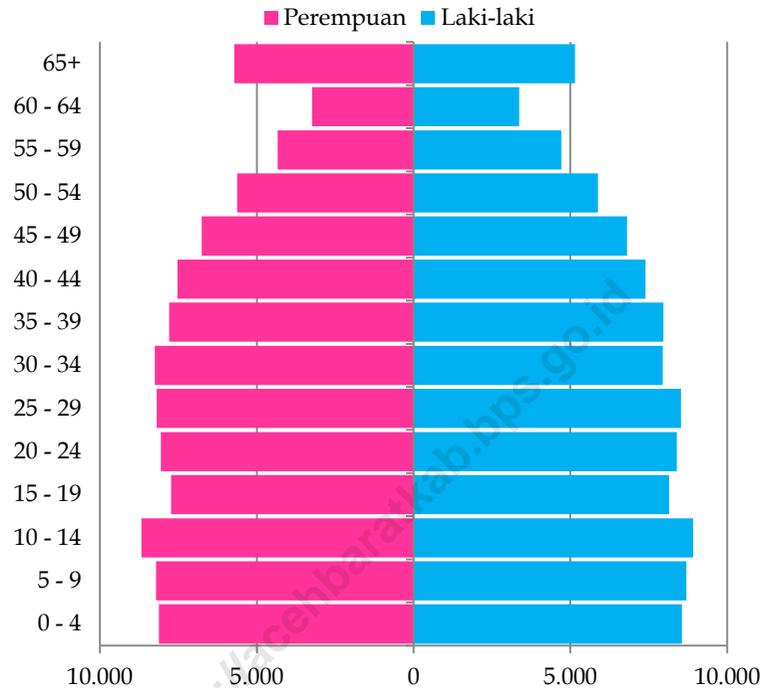
Dari struktur umur penduduk di suatu daerah, dapat diketahui apakah penduduk di wilayah tersebut berstruktur umur muda atau berstruktur umur tua. Dikatakan berstruktur umur muda apabila kelompok penduduk yang berusia di bawah 15 tahun jumlahnya besar (lebih dari 35 persen), dan besarnya kelompok penduduk usia 65 tahun keatas lebih kurang 3 persen. Sebaliknya dikatakan berstruktur umur tua apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kecil (kurang dari 35 persen dari seluruh penduduk) dan persentase penduduk diatas 65 tahun sekitar 15 persen (Mantra, 1985).

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin secara grafik dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur pada piramida tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan penduduk masa yang akan datang.

Piramida penduduk Kabupaten Aceh Barat 2020 seperti yang disajikan pada Gambar 3.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berada pada kelompok umur dibawah 5 tahun cenderung berkurang karena penurunan jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di Aceh Barat sudah cukup rendah. Dengan demikian, perlu

dipertahankan upaya dari pemerintah dalam menekan angka kelahiran, seperti dengan menggalakkan program KB dan menunda usia perkawinan pertama.

Gambar 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Aceh Barat, 2020



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan Tabel 3.4., Penduduk Kabupaten Aceh Barat sebagian besar berada pada kelompok umur produktif atau masih tergolong struktur umur muda, yaitu 68,78 persen. Hal ini ditunjukkan dari persentase penduduk umur muda (dibawah 15 tahun) sebesar 25,75 persen pada tahun 2020 serta penduduk umur 65 tahun keatas sebesar 5,47 persen. Salah satu penyebab Kabupaten Aceh Barat memiliki proporsi penduduk produktif yang cukup tinggi karena merupakan wilayah dengan sarana dan prasarana yang lebih baik diantara kabupaten/kota dalam kawasan pantai barat selatan Aceh, sehingga mendorong terjadinya perpindahan penduduk usia produktif dari wilayah lain ke Aceh Barat, khususnya di Meulaboh. Hal ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga terampil,

mandiri untuk mengisi peluang-peluang ekonomi dan tantangan ke depan pada era perdagangan bebas dan globalisasi.

Tabel 3.4 Persentase Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Aceh Barat, 2010-2020

Kelompok Umur	2010	2020
(1)	(2)	(3)
0-14 tahun	50.743	51.175
15-64 tahun	116.558	136.696
≥ 65 tahun	6.257	10.865
Jumlah	173.558	198.736
Angka Beban Ketergantungan	48,90	45,39

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020

Untuk mengetahui sejauh mana besarnya beban yang ditanggung oleh penduduk berusia produktif terhadap penduduk non produktif, dapat dilihat dari angka rasio beban ketergantungan baik anak-anak (0-14 tahun) maupun lansia (≥ 65 tahun). Tabel 3.4. memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Aceh Barat sebesar 45,39 persen artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif.

Selama periode 2010-2020, angka beban ketergantungan mengalami penurunan dari 48,90 menjadi 45,39 persen. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

3.5 Administrasi Kependudukan

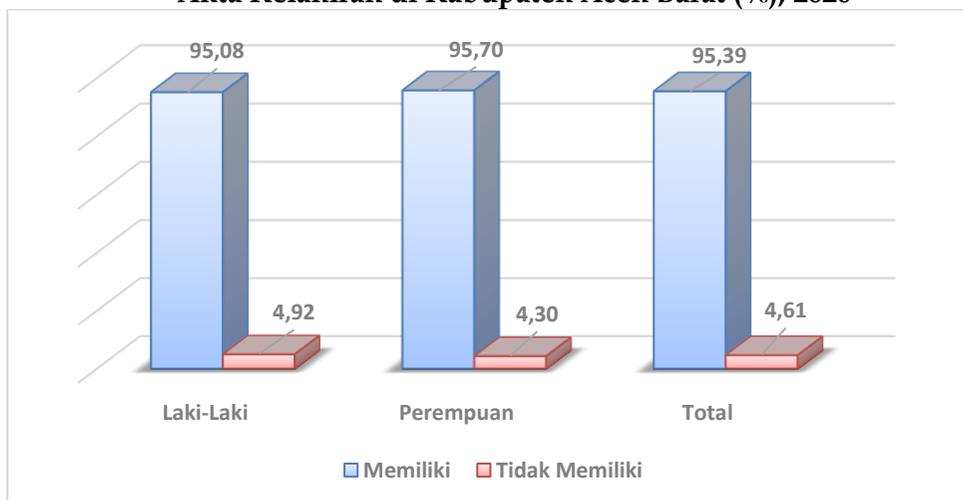
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register

Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Kemudahan bagi Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Pada tahun 2020, 99,64 persen penduduk Kabupaten Aceh Barat berumur 17 tahun ke atas telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Gambar 3.2 Penduduk Berumur 0-17 Tahun menurut Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Aceh Barat (%), 2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Barat 2020

Salah satu dokumen wajib kependudukan adalah akte kelahiran. Akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembarnya yang sudah dicetak berlandaskan undang-undang dan dapat pula dipertanggungjawabkan keasliannya.

Pada tahun 2020, masih terdapat 4,61 persen penduduk Kabupaten Aceh Barat berumur 0-17 tahun yang belum memiliki akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Lebih banyak penduduk perempuan yang memiliki akte tersebut dibandingkan penduduk laki-laki, masing-masing 95,70 persen dan 95,08 persen.



BAB IV KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan tiga pilar sekaligus, yakni pemerintah, buruh, dan dunia usaha. Dalam konteks itu, pemerintah berkepentingan agar iklim ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan aliran investasi, meningkatkan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, buruh berkepentingan dalam soal kesejahteraan, terutama pengupahan, pesangon, dan jam kerja. Sebaliknya, dunia usaha berkepentingan dalam hal efisiensi melalui pengurangan biaya operasional perusahaan yang kerap menyasar pengeluaran untuk buruh, seperti upah dan pesangon.

Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia saat ini cukup kompleks. Permasalahan tersebut terutama bersumber dari banyaknya "supply" tenaga kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia maupun produktivitas kerja yang berimplikasi pada masih rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk menyerap angkatan kerja tidaklah sebaik apa yang diharapkan.

Angkatan kerja di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 didominasi oleh penduduk laki-laki, yakni sebesar 80,02 persen (Tabel 4.1.). Hal ini tidak terlepas dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk laki-laki yang jauh di atas TPAK penduduk perempuan. Meski TPAK Aceh Barat di tahun 2020 mencapai 59,41 persen, namun TPAK penduduk perempuan hanya 38,13 persen.

Tabel 4.1 TPAK, TKK dan TPT di Kabupaten Aceh Barat, 2020

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	80,02	38,13	59,41
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	92,15	93,90	92,70
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,85	6,09	7,30

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

Hanif Dhakiri, selaku Menteri Ketenagakerjaan, juga mengakui hal tersebut. (<https://bisnis.tempo.co/read/1251368/hanif-dhakiri-ungkap-penyebab-perempuan-memilih-tak-bekerja/full&view=ok>). Menurutnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja di Indonesia masih rendah dan partisipasi laki-laki di dunia kerja jauh lebih tinggi. Perempuan umumnya disuruh memilih untuk bekerja atau mengurus keluarga. Menurutnya, fenomena ini terjadi karena ekosistem kerja di Indonesia, khususnya yang menyangkut jam kerja, masih kaku. Ia mengatakan perempuan kerap dihadapkan pada persoalan benturan waktu antara kerja dan urusannya sebagai ibu rumah tangga di rumah.

Meskipun TPAK jauh di bawah penduduk laki-laki, nyatanya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) penduduk perempuan masih lebih baik dibandingkan TKK penduduk laki-laki. TKK perempuan sebesar 93,90 persen yang menunjukkan bahwa 93,90 persen penduduk perempuan yang memasuki dunia kerja di tahun 2020 dalam posisi bekerja, bukan pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang digunakan sebagai angka pengangguran di suatu wilayah untuk Kabupaten Aceh Barat di tahun 2020 sebesar 7,30 persen. TPT penduduk laki-laki lebih besar daripada TPT penduduk perempuan (7,85 persen terhadap 6,09 persen) karena umumnya tanggung jawab mencari nafkah dalam keluarga sejatinya ada di pundak laki-

laki sebagai kepala keluarga sehingga proporsi dalam mencari pekerjaan lebih didominasi oleh laki-laki.

4.1 Penduduk Usia Kerja

Terdapat 156.331 orang penduduk usia kerja yakni mereka yang berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020. Jumlah itu mencakup 78,67 persen dari populasi penduduk Kabupaten Aceh Barat. Tidak seluruh penduduk memilih untuk menjadi bagian dari angkatan kerja. Ada yang melakukannya dengan alasan masih sekolah, mengurus rumah tangga, ataupun atas alasan pribadi lainnya.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Aceh Barat, 2020



Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

Pada dasarnya, penduduk yang termasuk ke dalam bukan angkatan kerja dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Angkatan kerja potensial (*potential labour force*), mencakup mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, namun belum bersedia/siap untuk segera memulai suatu pekerjaan; dan tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, namun mengaku bersedia/siap untuk segera memulai suatu pekerjaan. Termasuk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa).

- b. Penduduk yang menginginkan suatu pekerjaan namun tidak sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha dan mengaku saat ini belum bersedia/siap untuk segera memulai suatu pekerjaan.
- c. Penduduk yang tidak menginginkan pekerjaan.

Dari sejumlah 156.331 orang penduduk usia kerja yakni mereka yang berumur 15 tahun ke atas, sebanyak 92.879 orang (59,41 persen) merupakan bagian dari angkatan kerja sedangkan sebanyak 63.452 orang (40,59 persen) bukan bagian dari angkatan kerja.

Dari sejumlah 63.452 orang penduduk usia kerja yang memilih menjadi bukan bagian dari angkatan kerja dengan alasan sekolah sebanyak 16.383 orang (25,82 persen), dengan alasan mengurus rumah tangga sebanyak 38.566 orang (60,78 persen), sedangkan sebanyak 8.503 orang (13,40 persen) tergolong ke dalam bukan angkatan kerja dengan alasan kegiatan lainnya (pensiun, kegiatan selain tidur , dll).

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Aceh Barat, 2020

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	63.551	29.328	92.879
Bekerja	58.562	27.540	86.102
Pengangguran	4.989	1.788	6.777
Bukan Angkatan Kerja	15.870	47.582	63.452
Sekolah	7.016	9.367	16.383
Mengurus Rumah Tangga	3.279	35.287	38.566
Lainnya	5.575	2.928	8.503
Penduduk Usia Kerja	79.421	76.910	156.331

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

Jumlah penduduk laki-laki yang memilih menjadi bagian dari angkatan kerja 2,17 kali lipat penduduk perempuan. Sebaliknya, jumlah penduduk perempuan yang memilih bukan menjadi bagian dari angkatan kerja hampir tiga kali lipat penduduk laki-laki. 74,16 persen di antara perempuan tersebut

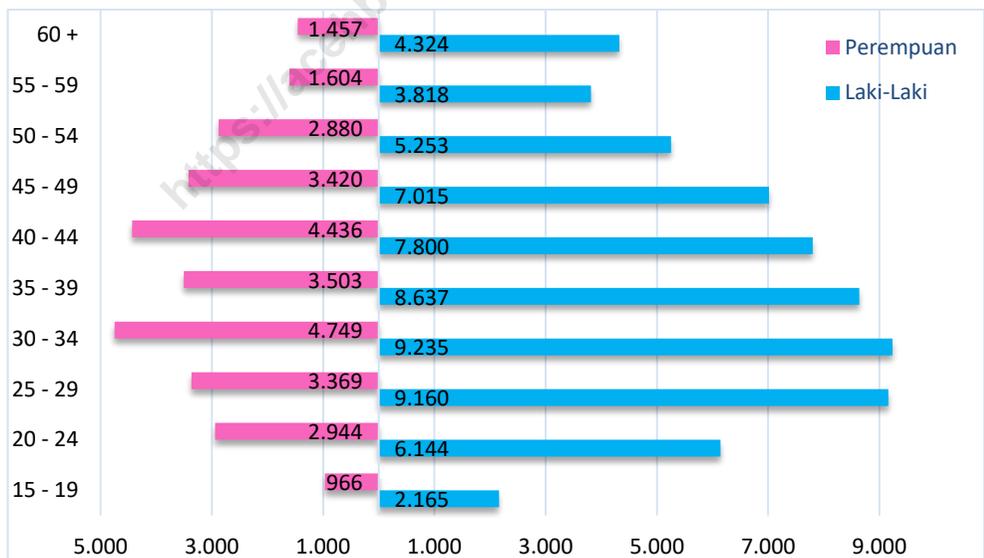
memilih alasan mengurus rumah tangga daripada terlibat dalam dunia kerja (Tabel 4.2.).

4.2 Angkatan Kerja

4.2.1 Kelompok Umur Angkatan Kerja

Berdasarkan Gambar 4.2. menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kabupaten Aceh Barat timpang lebih berat ke arah penduduk laki-laki. Dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa angkatan kerja terbesar berada pada kelompok umur 30-34 tahun. Terdapat 9.235 laki-laki atau 9,94 persen dari keseluruhan angkatan kerja di Kabupaten Aceh Barat tahun 2020 berada dalam kelompok umur ini. Pada kelompok umur ini, umumnya mereka sudah memasuki dunia kerja. Sama halnya dengan penduduk perempuan, angkatan kerja terbesar berada dalam kelompok umur 30-34 tahun.

Gambar 4.2 Piramida Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Barat, 2020



Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

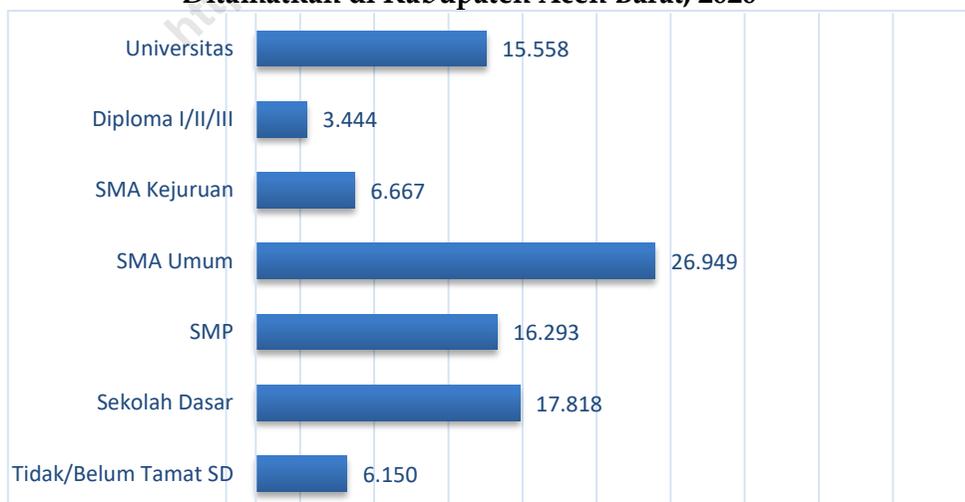
Semakin bertambah umur, angkatan kerja pun cenderung menunjukkan semakin berkurang baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Jumlah angkatan kerja pemula (umur 15-19 tahun) relatif lebih kecil

dibandingkan jumlah angkatan kerja manula (umur 60+). Hal ini dikarenakan pada rentang usia 15-19 tahun mayoritas penduduknya masih mengenyam pendidikan sekolah/kuliah. Di sisi lain, angkatan kerja penduduk perempuan dalam kelompok umur 50-59 tahun lebih sedikit dibandingkan kelompok umur 20-29 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk perempuan memilih untuk lebih cepat meninggalkan dunia kerja dibandingkan penduduk laki-laki.

4.2.2 Angkatan Kerja dan Pendidikan

Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar akan mampu menjadi potensi pembangunan apabila dibina dengan baik. Pembinaan yang baik akan menghasilkan kualitas angkatan kerja yang baik. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Hal ini bisa terjadi bila mutu angkatan kerja yang ada tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan dunia usaha.

Gambar 4.3 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Aceh Barat, 2020



Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan dan latihan negara tersebut. Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang minim pula. Imbasnya adalah produktivitas tenaga kerja menjadi rendah sehingga berpengaruh terhadap minimnya capaian kualitas hasil produksi barang dan jasa.

Dapat dilihat pada Gambar 4.3, Sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 masih berpendidikan SMA Umum, yakni sebanyak 26.949 orang atau 29,02 persen. Sementara itu, angkatan kerja lulusan Sekolah Dasar menjadi jumlah terbesar kedua, yakni sebanyak 17.818 orang atau 19,18 persen. Besarnya angka ini menjadi dorongan pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari sektor pendidikan.

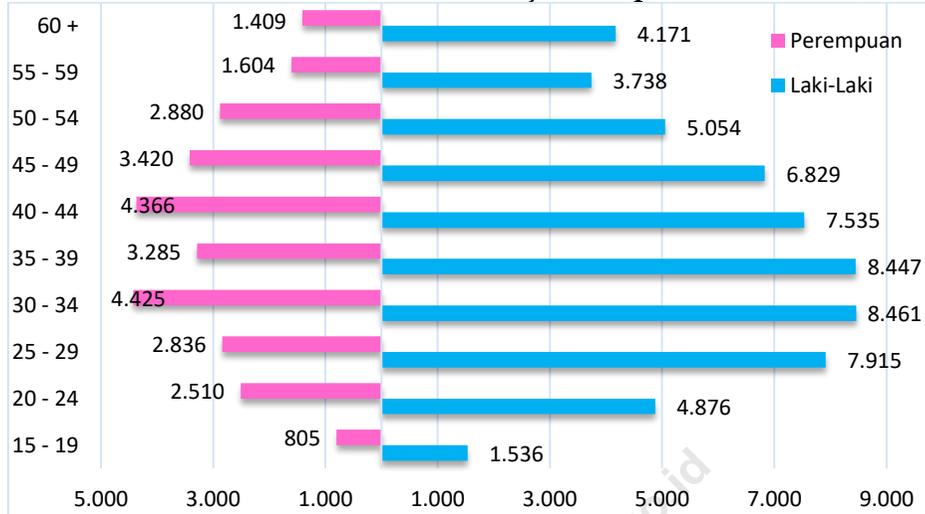
Angkatan kerja lulusan SMP menempati posisi ketiga jumlah angkatan kerja di atas lulusan Universitas dan SMA Kejuruan. Selain itu, patut dicermati bahwa angkatan kerja lulusan SMA kejuruan hampir sama banyaknya dengan angkatan kerja yang tidak/belum tamat SD yaitu sekitar 6-7 persen.

4.3 Bekerja

4.3.1 Kelompok Umur Penduduk Bekerja

Dapat dilihat pada Gambar 4.4 bahwa piramida penduduk bekerja sangat timpang dan lebih berat sebelah ke arah penduduk laki-laki. Selain itu, penduduk yang bekerja paling banyak berada dalam rentang umur 30-34 tahun. Terdapat 12.886 orang atau 14,97 persen dari penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Aceh Barat tahun 2020 pada kelompok umur tersebut. Tercatat 65,66 persen dari mereka yang bekerja pada rentang umur ini adalah laki-laki.

Gambar 4.4. Piramida Penduduk Bekerja Kabupaten Aceh Barat, 2020



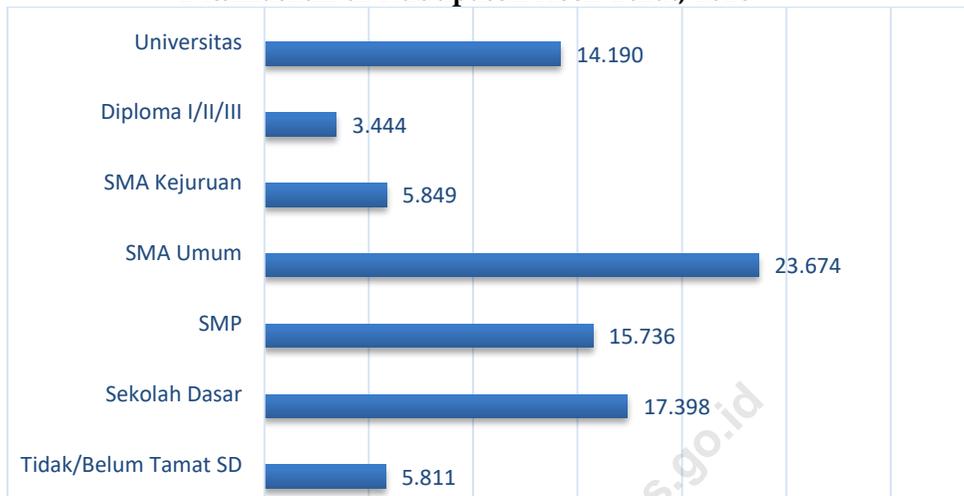
Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

Seperti halnya piramida angkatan kerja, semakin bertambah umur penduduk maka semakin sedikit pula jumlah penduduk yang bekerja. Selain itu, semakin banyak angkatan kerja pada suatu kelompok umur, maka semakin banyak pula penduduk yang bekerja. Hal tersebut berlaku baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan.

4.3.2 Bekerja dan Pendidikan

Seiring dengan banyaknya angkatan kerja lulusan SMA Umum dan Sekolah Dasar (SD), jumlah penduduk bekerja terbesar pun merupakan lulusan SMA Umum dan Sekolah Dasar. Tercatat 23.674 pekerja merupakan lulusan SMA Umum dan Sekolah Dasar. Lulusan kedua jenjang tersebut mencapai 47,70 persen dari penduduk yang bekerja.

Gambar 4.5 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Aceh Barat, 2020

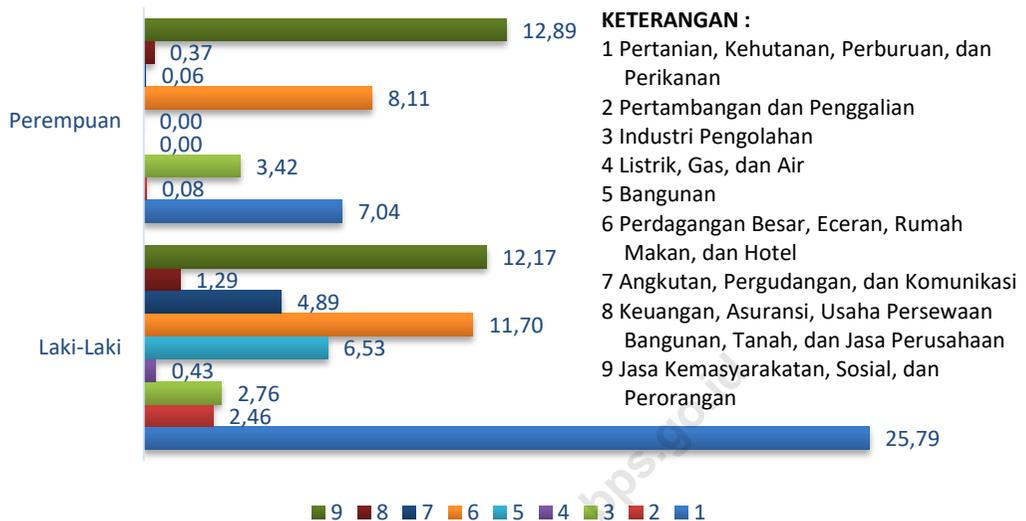


Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

4.3.3 Lapangan Usaha Penduduk Bekerja

Kabupaten Aceh Barat merupakan wilayah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber perekonomian. Sektor ini didominasi oleh pekerja yang bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan. Selanjutnya Aceh Barat juga unggul pada lapangan usaha jasa-jasa sebagai penggerak roda ekonomi. Meulaboh, ibu kota dari Kabupaten Aceh Barat merupakan sentra ekonomi untuk wilayah pantai barat selatan Aceh sehingga tidak jarang kita lihat beberapa perwakilan instansi vertikalnya ada di wilayah ini. Selain itu, Meulaboh juga dapat dikatakan sebagai pusat kota pendidikan karena terdapat Universitas terbesar di pantai barat selatan Aceh, yakni Universitas Teuku Umar. Perusahaan swasta besar dan skala nasional pun membuka kantor cabang dan perwakilan di kota ini. Juga terdapat Mall Pusat Perbelanjaan di kota ini.

Gambar 4.6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Barat (persen), 2020



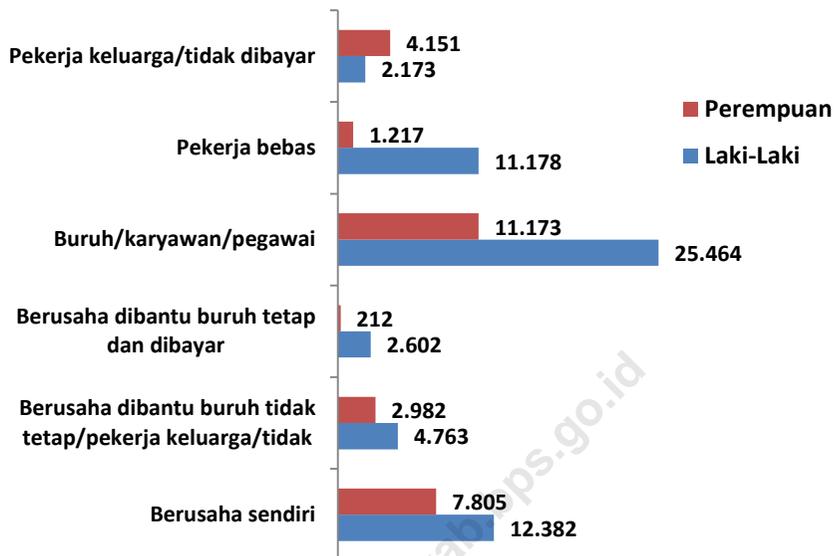
Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

Apabila dilihat berdasarkan karakteristiknya, baik pekerja laki-laki maupun perempuan di sektor pertanian memiliki proporsi yang seimbang yakni sekitar 12 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa bidang pekerjaan pada lapangan usaha ini tidak membedakan kemampuan gender. Sementara itu, pekerja yang bergerak di sektor jasa mayoritas diisi oleh laki-laki. Tercatat tenaga kerja laki-laki yang terserap pada lapangan usaha ini hampir empat kali lebih besar dibandingkan tenaga kerja perempuan.

4.3.4 Status Usaha Penduduk Bekerja

Secara umum penduduk Kabupaten Aceh Barat yang bekerja merupakan buruh dan pengusaha. Tercatat 42,55 persen atau sebanyak 36.637 pekerja yang berstatus usaha sebagai buruh sedangkan 35,71 persen atau 30.746 orang merupakan pengusaha, baik mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, ataupun berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar.

Gambar 4.7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Barat, 2020



Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

Apabila dilihat menurut karakteristiknya, pekerja laki-laki lebih dominan untuk beberapa status pekerjaan utama, kecuali pada pekerja keluarga/tidak dibayar. Hal ini terjadi karena umumnya pekerja keluarga di Aceh Barat merupakan istri dari kepala rumah tangga yang bekerja sebagai petani atau pedagang.

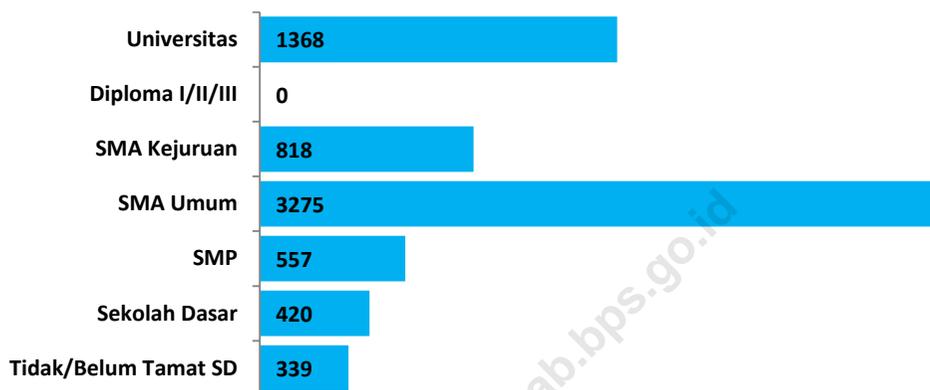
4.3.1 Pengangguran

Jumlah pengangguran terbesar berada pada lulusan SMA Umum dan Universitas. Dengan kata lain, Aceh Barat didominasi oleh pengangguran terdidik. Tingginya jumlah penganggur ini kemungkinan disebabkan mereka masih ingin menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya sehingga ada kecenderungan dalam memilih jenis pekerjaan.

Sementara itu, penduduk Aceh Barat dengan lulusan Diploma I/II/III tidak ada yang bersatus menganggur. Hal ini terjadi kemungkinan karena

mereka cenderung lebih terampil dan siap pakai untuk mengisi lapangan pekerjaan.

Gambar 4.8 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Aceh Barat, 2020



Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021



BAB V KESEHATAN

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Derajat kesehatan penduduk antara lain dapat diukur dengan angka kesakitan dan rata-rata lama sakit. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

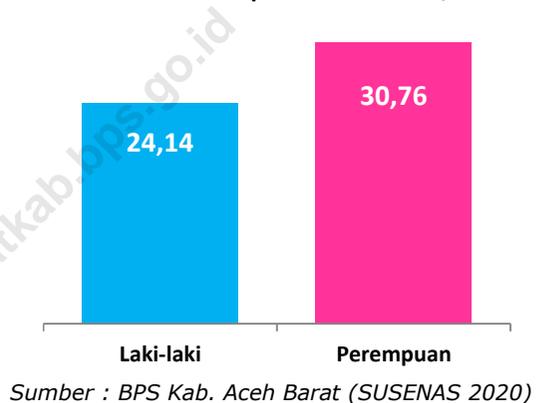
Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Tingkat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya pembangunan di suatu daerah karena hal tersebut merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara fisik maupun mental. Daerah yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi derajat kesehatan dapat diartikan semakin baik kualitas sumber daya manusia, terlebih bila dihubungkan dengan kesehatan ibu dan anak.

5.1 Angka Kesakitan

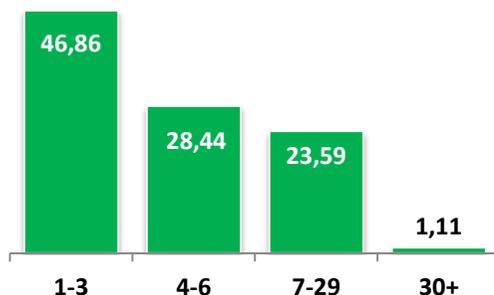
Informasi status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama sebulan sebelum pencacahan. Semakin banyak penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, menunjukkan bahwa derajat kesehatan di suatu daerah masih rendah, demikian juga sebaliknya, apabila angka kesakitan penduduk rendah menunjukkan derajat kesehatan di daerah tersebut sudah semakin baik. Angka kesakitan ini dapat dicerminkan oleh banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan berdasarkan jenis keluhan yang dideritanya.

Pada Gambar 5.1. di atas, persentase penduduk laki-laki di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 yang mengalami gangguan kesehatan lebih sedikit dibandingkan perempuan, yaitu masing-masing sebesar 24,14 persen dan 30,76 persen.

Gambar 5.1.
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat, 2020



Gambar 5.2.
Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan yang Lalu Menurut Jumlah Hari Sakit di Kabupaten Aceh Barat, 2020

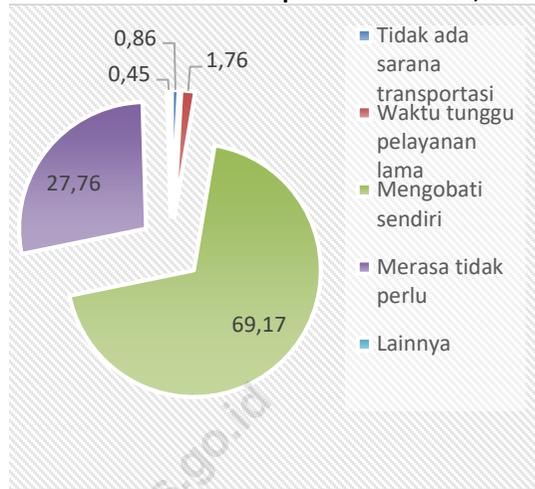


Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

Dari Gambar 5.2., tampak bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 menderita sakit selama ≤ 3 hari dengan persentase sebesar 46,86 persen, sakit selama 4-6 hari diderita 28,44 persen, dan lebih dari 24 persen penduduk menderita sakit selama lebih dari seminggu.

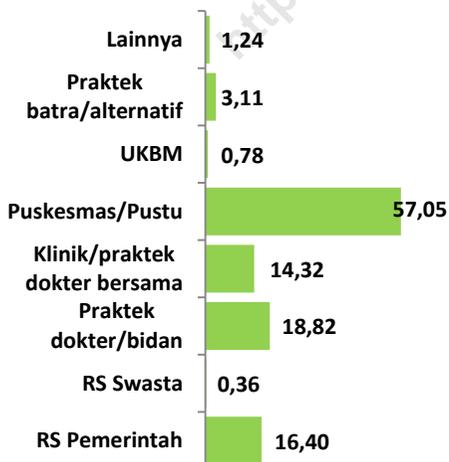
Dalam upaya untuk mengatasi keluhan kesehatan, hanya 59,62 persen penduduk memilih yang memilih berobat jalan. Gambar 5.3. menunjukkan alasan yang disampaikan penduduk yang memilih untuk tidak berobat jalan dimana 69,17 persen penduduk memilih untuk melakukan pengobatan sendiri dan 27,76 persen penduduk beralasan bahwa hal tersebut tidak perlu karena mereka percaya bahwa sakit yang diderita akan sembuh dengan sendirinya.

Gambar 5.3.
Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan di Kabupaten Aceh Barat, 2020



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

Gambar 5.4.
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Berdasarkan Fasilitas Kesehatan yang Dikunjungi di Kab. Aceh Barat, 2020



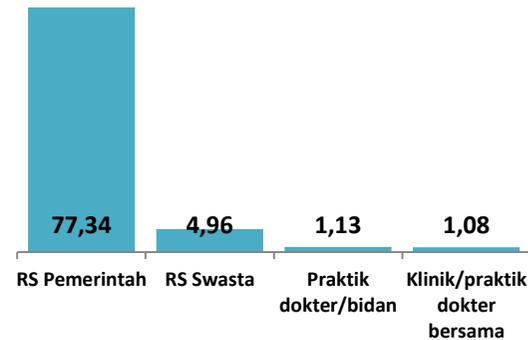
Sumber: BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

14,32 persen, dan selebihnya berobat jalan di RS swasta, UKBM, praktek pengobatan tradisional/alternatif, dan lainnya (Gambar 5.4).

Fasilitas kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan oleh penduduk yang memilih untuk berobat jalan adalah puskesmas/pustu karena selain terjangkau bagi semua kalangan masyarakat, pelayanan di puskesmas juga semakin membaik. Tahun 2020, persentase penduduk yang berobat jalan di puskesmas/pustu sebesar 57,05 persen, sedangkan praktek dokter/bidan sebesar 18,82 persen, RS Pemerintah sebesar 16,40 persen, klinik/praktek dokter bersama sebesar

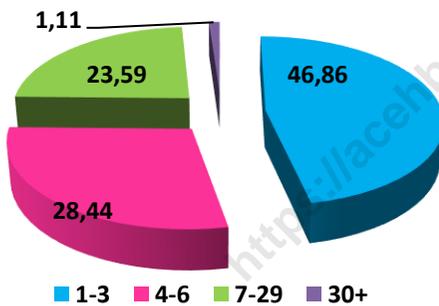
Dalam upaya lain untuk mengatasi keluhan kesehatan, terdapat 7,27 persen penduduk yang mengakui pernah harus menjalani rawat inap. 77,34 persen memilih rumah sakit pemerintah sebagai tempat rawat inap dan 4,96 persen lainnya memilih menggunakan rumah sakit swasta (Gambar 5.5.).

Gambar 5.5.
Persentase Penduduk yang Rawat Inap Menurut Tempat Rawat Inap di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

Gambar 5.6.
Persentase Penduduk Menurut Banyaknya Hari Harus Dirawat Inap di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

Sebagian besar masyarakat tidak menghabiskan waktu yang lama ketika menjalani keharusan rawat inap. 46,86 persen penduduk menjalani rawat inap selama 1-3 hari dan 28,44 persen terpaksa menjalani rawat inap yang lebih lama hingga 6 hari. Ada 1,11 persen penduduk yang ternyata harus menjalani rawat inap lebih dari sebulan (Gambar 5.6.). 5,20 hari menjadi rata-

rata lama menginap penduduk Kabupaten Aceh Barat di tahun 2020. Sebanyak 99,48 persen penduduk membiayai tagihan rawat inap menggunakan jaminan kesehatan.

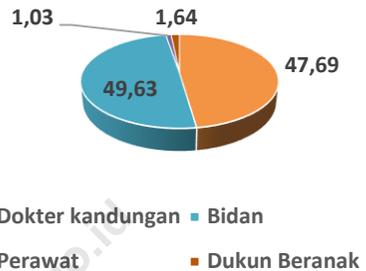
5.2 Penolong Kelahiran

Penolong kelahiran sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan bayi dan ibu pada saat proses melahirkan. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dapat dianggap lebih baik dibandingkan tenaga non medis seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan yang kurang baik oleh penolong kelahiran dapat mengakibatkan

kondisi kesehatan bayi dan ibu menjadi berbahaya seperti terjadinya kejang-kejang, pendarahan pada ibu saat melahirkan maupun kematian ibu dan anak yang tentunya tidak diinginkan oleh siapapun.

Pada Tahun 2020, hanya ada empat tipe tenaga medis yang menjadi penolong kelahiran bayi di Kabupaten Aceh Barat, yakni persalinan yang ditolong oleh bidan sebesar 49,63 persen, dokter kandungan sebesar 47,69 persen, dukun beranak sebesar 1,64 persen dan perawat sebesar 1,03 persen (Gambar 5.7.). Dengan

Gambar 5.7.
Persentase Penolong Persalinan di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

demikian, dapat dikatakan bahwa kesadaran akan pentingnya memilih penolong persalinan yang tepat telah dipahami oleh sebagian besar penduduk di Aceh Barat.

Gambar 5.8.
Persentase Tempat Kelahiran Persalinan di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

Sisanya penduduk Aceh Barat memilih melakukan persalinan di rumah, puskesmas dan praktek nakes dengan berbagai alasan (Gambar 5.8.).

Berat badan lahir menjadi barometer kesehatan bayi meski bukan alat ukur sempurna. Berat bayi normal pada kandungan 37-42 minggu adalah 2,5-4 kg. Pada umumnya, bayi yang terlahir dengan berat kurang dari 2,5 kg

Tingkat kesadaran itu pula yang mendorong lebih dari setengah penduduk Aceh Barat untuk memilih rumah sakit baik pemerintah, swasta, maupun rumah sakit ibu dan anak sebagai tempat persalinan (58,91 persen). Sebanyak 22,45 persen penduduk lainnya memilih persalinan di rumah bersalin atau klinik.

dianggap memiliki berat badan di bawah batas normal. Sebanyak 92,05 persen bayi yang dilahirkan di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 memiliki berat badan di atas 2,5 kg dan hanya 5,11 persen bayi yang memiliki berat lahir di bawah 2,5 kg.

5.3 Pemberian ASI

Tingkat kecerdasan anak dipengaruhi oleh kualitas makanan yang diberikan pada saat anak tersebut berusia balita dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) sewaktu bayi. ASI merupakan kebutuhan pokok bagi bayi karena mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak, pembentukan tulang serta sebagai alat untuk memerangi penyakit dan melindungi tubuh dari kuman karena selain mengandung nilai gizi yang cukup tinggi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Oleh karena itu, semakin lama anak disusui akan semakin baik tingkat pertumbuhan dan kesehatannya. ASI eksklusif (pemberian ASI tanpa makanan tambahan sampai usia 6 bulan), dianjurkan oleh para ahli kesehatan karena dipercaya mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi ibu sebagai suatu bentuk perwujudan kasih sayang maupun bayi untuk kesehatannya kelak.

Pada Tabel 5.1., terlihat bahwa lebih banyak anak perempuan berusia kurang dari 2 tahun yang sempat menikmati pemberian ASI lebih lama dibandingkan anak laki-laki. Sementara itu, durasi pemberian ASI lebih lama diberikan untuk bayi laki-laki dibandingkan bayi perempuan.

Tabel 5.1.
Persentase Anak Berumur Kurang Dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI, 2020

Indikator	Laki-laki	Perempuan
	(2)	(3)
< 12 bln	92,48	100
Lamanya (bulan)	14,37	11,77

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Barat 2020

5.4 Imunisasi

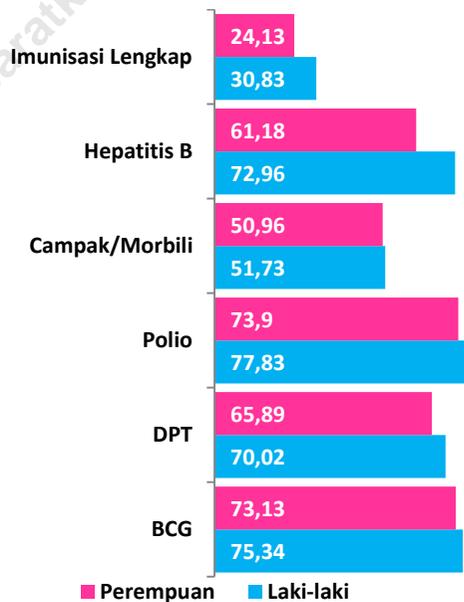
Imunisasi saat ini sudah menjadi hal yang wajib untuk diberikan kepada bayi, apalagi pemerintah juga sangat mendukung dengan

mencanangkan program pemberian imunisasi dasar lengkap secara gratis. Usia anak-anak merupakan usia paling rentan terhadap berbagai virus dan penyakit. Maka dari itu, sejak dini anak perlu mendapatkan kekebalan tubuh melalui pemberian vaksin atau imunisasi agar terhindar dari penyakit yang mungkin dapat mengakibatkan cacat bahkan kematian.

Pada dasarnya kekebalan pada seseorang terbentuk dalam dua cara, yaitu kekebalan pasif dan kekebalan aktif. Pada kekebalan pasif, tubuh tidak membentuk sendiri kekebalan tubuhnya, sedangkan pada kekebalan aktif, tubuh ikut berperan dalam membentuk kekebalan. Keduanya itu sendiri dapat berlangsung secara alami melalui dua cara, yaitu bawaan ataupun didapat dari luar.

Dapat dilihat pada Gambar. 5.9. bahwa lebih banyak balita laki-laki yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap dibandingkan balita perempuan, masing-masing 30,83 persen dan 24,13 persen. Hal yang sama juga terjadi untuk balita laki-laki yang pernah mendapatkan salah satu jenis imunisasi walaupun tidak lengkap lebih besar dibandingkan balita perempuan. Vaksinasi Campak menjadi jenis pemberian imunisasi yang lebih sedikit diberikan dibandingkan vaksin-vaksin lainnya.

Gambar. 5.9.
Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenisnya di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Barat 2020

BAB VI PENDIDIKAN



Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu faktor kebutuhan dasar manusia dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Pada tahap tertentu tingkat pendidikan dapat meningkatkan status sosial dalam kehidupan masyarakat. Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka melek huruf.

Upaya pembangunan dan pengembangan pendidikan pada umumnya lebih diarahkan pada usaha memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana Wajib Belajar 6 tahun yang dicanangkan pada tahun 1984 menjadi Wajib Belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994. Diharapkan dengan demikian tingkat pendidikan penduduknya akan lebih baik dan jumlah penduduk yang buta huruf akan berkurang terutama pada penduduk usia sekolah (7-18 tahun).

6.1 Status Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan kesejahteraan yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan demografi yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan.

Penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar lima persen pada tahun 2020 dimana persentase perempuan lebih besar dari laki-laki, yaitu masing-masing 5,57 persen dan 4,44 persen (tabel 6.1). Sementara itu, penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah sebesar 26,44 persen, dimana persentase laki-laki sebesar 25,33 persen dan perempuan sebesar 27,59 persen.

Tabel 6.1.
Persentase Penduduk Umur 5 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan di Kab. Aceh Barat, 2020

Status Pendidikan	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah	4,44	5,57	5,00
Masih sekolah	25,33	27,59	26,44
Tidak bersekolah lagi	70,23	66,84	68,56
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

6.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, kemungkinan untuk dapat memperoleh pekerjaan semakin besar sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan semakin meningkat, sedangkan pengaruh tidak langsung, akan terlihat dari pola pikir masyarakat, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, maka cara berpikir

Tabel 6.2.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kab. Aceh Barat, 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya ijazah SD	8,18	10,64	9,39
SD/MI/SDLB/Paket A	21,26	25,47	23,33
SMP/MTs/SMPLB/Paket B	25,55	17,81	21,74
SMA/MA/SMLB/Paket C	29,14	25,23	27,21
SMK/MAK	3,98	3,77	3,88
Diploma 1/2	0,47	1,42	0,94
Diploma 3	1,14	4,30	2,70
Diploma 4/S1	10,02	10,91	10,46
Profesi	0,00	0,00	0,00
S2	0,25	0,44	0,34
S3	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

mereka akan lebih maju sehingga lebih mudah menerima perubahan dan kemajuan.

Dapat dilihat pada Tabel 6.2., penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Aceh Barat yang berhasil menamatkan pendidikan dari jenjang SD/ sederajat sampai SMA/ sederajat sebesar 76,16 persen pada tahun 2020, sedangkan yang menamatkan pendidikan dari jenjang Diploma sampai S3 sebesar 14,44 persen dan sisanya 9,39 persen belum/ tidak tamat SD.

6.3 Angka Buta Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 10 tahun ke atas. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Tinggi rendahnya angka buta huruf suatu masyarakat mencerminkan kualitas masyarakat tersebut.

Terdapat 97,84 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang mampu membaca/ menulis di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 (Tabel 6.3.). Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan buta huruf lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki (3,14 persen terhadap 1,20 persen).

Tabel 6.3.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas
Menurut Kemampuan Baca/Tulis dan Jenis Kelamin di
Kab. Aceh Barat, 2020

Tahun	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Buta Huruf	1,20	3,14	2,16
Melek Huruf	98,80	96,86	97,84
- baca tulis Huruf Latin*	100	100	100
- baca tulis Huruf Arab*	13,21	10,68	11,95
- baca tulis huruf lainnya*	0,78	0,96	0,87

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

* umur 15-24 tahun

Hampir seluruh penduduk yang melek huruf memiliki kemampuan baca tulis. Penduduk usia 15-24 tahun yang mampu membaca dan menulis menggunakan Huruf Latin sebanyak 100 persen. Di saat bersamaan 11,95

persen penduduk 15-24 tahun juga mampu membaca dan menulis menggunakan Huruf Arab serta 0,87 persen penduduk mengaku juga dapat membaca dan menulis menggunakan huruf lain selain Huruf Latin dan Arab.

6.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. APS merupakan indikator yang digunakan sebagai petunjuk keberhasilan program wajib belajar. Sebagai standar, program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai dari APS umur 7-12 tahun lebih dari 95 persen dan APS umur 13-15 tahun lebih dari 70 persen.

Mengacu pada kriteria tersebut, maka program wajib belajar di Kabupaten Aceh Barat telah berhasil karena APS untuk usia 7-12 tahun telah mencapai 99,69 persen, APS untuk usia 13-15 tahun telah mencapai 98,15 persen, sedangkan APS untuk usia 16-18 tahun sebesar 78,68 persen. (Tabel 6.4.). Realisasi APS pada kedua kelompok umur telah melebihi target 95 persen dan 70 persen.

Tabel 6.4.
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kab. Aceh Barat, 2020

Tahun	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
5-6	13,32	24,63	18,45
7-12	100,00	99,34	99,69
13-15	95,87	100	98,15
16-18	76,62	80,92	78,68

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

6.5 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Sekolah (APM) dapat menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut definisi, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Hal ini menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

APM untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2020 sebesar 99,59 persen (Tabel 6.5.). Hal ini menunjukkan bahwa murid SD yang berumur 7-12 tahun sebanyak 99,59 persen dan selebihnya merupakan murid SD yang berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun.

Pada jenjang pendidikan SMP, APM sebesar 89,01 persen yang berarti bahwa hanya 89,01 persen penduduk usia 13-15 tahun yang duduk di bangku SMP/ sederajat dan selebihnya masih duduk di bangku SD ataupun sudah di bangku SMA.

Demikian juga dengan APM SMA yang hanya 71,08 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 71,08 persen penduduk usia 16-18 tahun yang duduk di bangku SMA sedangkan sisanya masih duduk di bangku SMP ataupun sudah melanjutkan ke perguruan tinggi.

Tabel 6.5.
Angka Partisipasi Murni Menurut Kelompok Umur di Kab. Aceh Barat, 2020

APM	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	100	99,14	99,59
SMP	85,79	91,62	89,01
SMA	64,07	78,70	71,08

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)



BAB VII KELUARGA BERENCANA

Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Gerakan keluarga berencana diartikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka melembagakan dan membudidayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahteraan. Tujuan umum dari Keluarga Berencana adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Jika dilihat dari kacamata medis, terdapat berbagai manfaat menjalankan program keluarga berencana, yaitu:

1. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan
2. Mengurangi risiko aborsi
3. Menurunkan angka kematian ibu
4. Mengurangi angka kematian bayi
5. Membantu mencegah HIV/AIDS
6. Menjaga kesehatan mental keluarga

7.1 Status Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi

yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga

Pada dasarnya ada dua bentuk perkawinan, yaitu:

1. Perubahan status dari status belum kawin ke status kawin.
2. Kawin kembali yaitu perubahan dari status cerai menjadi kawin.

Tabel 7.1.
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan di Kab. Aceh Barat, 2020

Status Perkawinan	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	
Belum Kawin	40,89	30,04	35,55
Kawin	56,34	58,18	57,24
Cerai Hidup	0,80	1,19	0,99
Cerai Mati	1,97	10,59	6,21
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Aceh Barat (Susenas 2020)

perempuan, yaitu masing-masing sebesar 40,89 persen dan 30,04 persen. Sementara itu, penduduk perempuan yang berstatus cerai mati sebanyak 10,59 persen. Angka ini lebih besar daripada laki-laki yang hanya 1,97 persen.

7.2 Perkawinan Pertama

Perkawinan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat fertilitas dan secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Umur perkawinan pertama bagi wanita mempunyai dampak demografis karena berpengaruh terhadap angka fertilitas. Semakin muda seorang wanita kawin, semakin panjang masa reproduksinya dan semakin besar kemungkinan untuk mempunyai anak. Untuk itulah penduduk

Merujuk pada Tabel 7.1., penduduk berumur 10 tahun ke atas yang belum kawin di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 mencapai 35,55 persen, persentase penduduk berstatus kawin sebesar 57,24 persen. Penduduk Aceh Barat yang cerai hidup sebanyak 0,99 persen, sedangkan yang berstatus cerai mati sebesar 6,21 persen. Persentase laki-laki yang belum kawin lebih besar dibanding

dimotivasi untuk menunda usia perkawinan pertamanya hingga mencapai usia diatas 20 tahun untuk perempuan dan diatas 25 tahun bagi laki-laki.

Penundaan usia ketika perkawinan pertama dapat juga berdampak pada penurunan kematian ibu saat melahirkan maupun kematian bayi dan anak, karena usia perkawinan pertama pada usia muda, misalnya dibawah 17 tahun dapat berpengaruh terhadap stabilitas keluarga serta kesehatan wanita itu sendiri maupun anaknya. Semakin dewasa seseorang melangsungkan perkawinan pertamanya, maka semakin sehat waktu melahirkan dan makin sempurna dalam perawatan anak.

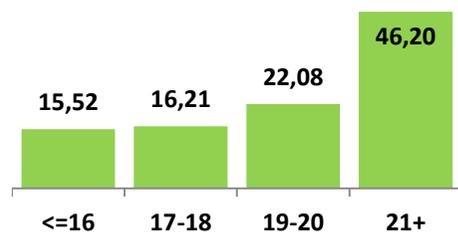
Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi. Tingginya AKI antara lain dipicu oleh 4 kondisi kehamilan yang tidak ideal atau yang disebut "4 terlalu", yaitu :

1. Kehamilan terlalu muda (kurang dari 18 tahun)
2. Usia yang terlalu tua untuk hamil (di atas 34 tahun)
3. Jarak kehamilan terlalu dekat (kurang dari 2 tahun)
4. Kehamilan terlalu banyak (lebih dari 3 anak)

Pembatasan usia pernikahan yang diatur oleh pemerintah bukan tanpa alasan. Salah satu alasan penting, yaitu mencegah kehamilan dini yang dapat meningkatkan risiko kematian pada ibu hamil dan melahirkan bayi prematur. Kehamilan dini meningkatkan risiko preeklampsia atau tekanan darah tinggi saat hamil. Pada perempuan usia remaja atau di bawah 18 tahun, pertumbuhan panggulnya belum sempurna, sehingga berisiko mengalami kelainan panggul yang berakibat persalinan normal sulit dilakukan.

Terdapat 53,81 persen wanita berumur 10 tahun ke atas pada tahun 2020 di Kabupaten Aceh Barat yang

Gambar 7.1.
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

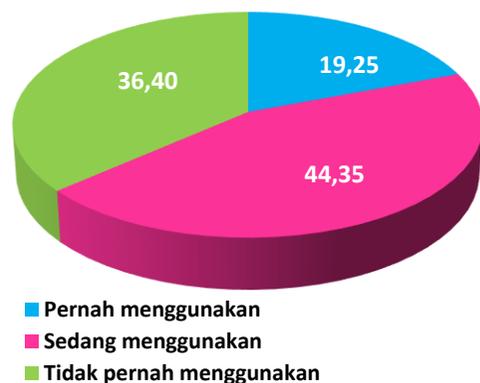
masih berusia kurang dari 21 tahun ketika menikah untuk pertama kali. Bila dirinci, 15,52 persen wanita menikah pertama kali ketika berusia 16 tahun atau kurang; 16,21 persen wanita menikah pertama kali ketika berusia 17-18 tahun, dan 22,08 persen wanita menikah pertama kali ketika berusia 19-20 tahun (Gambar. 7.1.).

6.3 Wanita Berstatus Kawin dan Alat/Cara KB yang Digunakan

Wanita berumur 15–49 tahun digolongkan sebagai Wanita Usia Subur (WUS), dimana dalam kelompok usia ini, menurut ilmu kesehatan merupakan usia yang paling produktif dalam hal melahirkan anak. Untuk itu Program KB memusatkan sasarannya terhadap wanita yang berada dalam kelompok usia ini, penurunan angka kelahiran merupakan salah satu sasaran Program KB yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Penurunan angka kelahiran dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat, bertambahnya peran wanita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga melainkan juga sebagai wanita karier, dan lain sebagainya. Namun di Indonesia pada umumnya faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi penurunan tingkat fertilitas adalah Program KB.

Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan wanita usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi KB di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Gambar 7.2. Pada tahun 2020, wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan KB sebanyak 44,35 persen sedangkan yang tidak menggunakan lagi sebanyak 19,25 persen dan yang tidak pernah

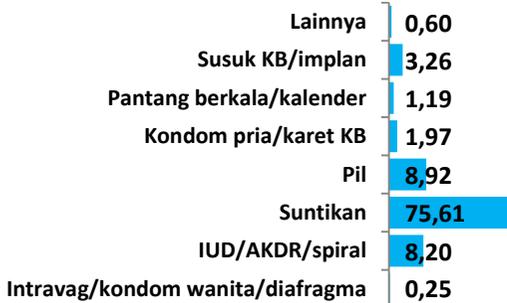
Gambar 7.2.
Persentase Wanita Berusia 15 – 49 Tahun Berstatus Kawin dan Penggunaan Alat KB di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

menggunakan KB sebanyak 36,40 persen.

Gambar 7.3.
Persentase Wanita Berusia 15 – 49 Tahun
Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang
Digunakan di Kab. Aceh Barat, 2020

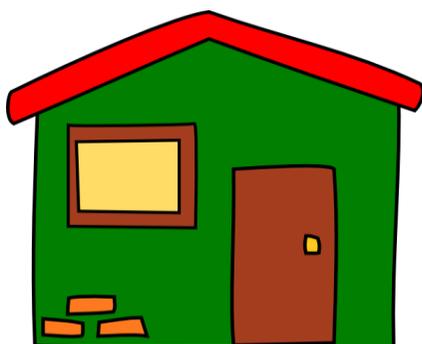


Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

Aceh Barat untuk menunda kehamilan adalah menggunakan pil. Pada tahun 2020 terdapat 75,61 persen wanita usia subur yang pernah kawin di Kabupaten Aceh Barat menggunakan suntik KB diikuti dengan pil sebesar 8,92 persen (Gambar 7.3.).

Dari beberapa jenis alat/cara KB yang digunakan, suntik KB merupakan cara yang paling diminati oleh pemakai alat KB, hal ini terlihat dari tingginya persentase penggunaan suntik KB dibandingkan dengan alat/cara KB lainnya yang tersedia. Selain suntik KB, cara yang diminati oleh wanita

usia subur yang pernah kawin di



BAB VIII PERUMAHAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok selain sandang dan pangan. Tanpa tempat tinggal dan tempat berlindung tentunya manusia tidak dapat hidup layak. Rumah juga dapat menjadi gambaran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Hal ini tercermin dari jenis lantai, dinding dan atap yang digunakan oleh rumah tangga. Selain itu fasilitas air minum, penerangan dan tempat buang air besar turut mencerminkan kesejahteraan masyarakat sebagai kebutuhan dasar manusia.

Tingginya permintaan perumahan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk serta kebutuhan manusia akan kenyamanan dan perlindungan. Hingga saat ini tidak semua rumah tangga memiliki rumah sendiri. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia melalui BTN dan PERUMNAS telah berusaha menyediakan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan cara pembayaran angsuran, walaupun disadari perumahan yang ditawarkan tersebut belum semuanya memenuhi persyaratan kenyamanan bagi yang menghuninya karena keterbatasan dana dan kemampuan pemerintah serta masyarakat itu sendiri. Rumah yang baik bukan saja memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya, tetapi juga bagi lingkungan di sekitarnya.

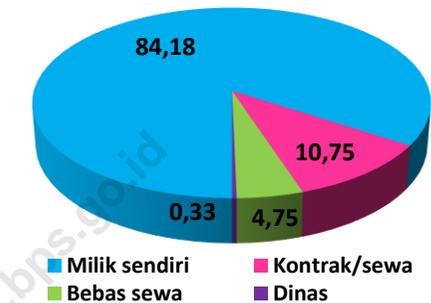
8.1 Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah dapat memberikan indikasi tentang tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu daerah. Apabila sebuah rumah tangga memiliki rumah sendiri maka tingkat kesejahteraannya lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki rumah

sendiri. Akibat tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat tinggal maka rumah tangga harus menyewa atau kontrak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan tempat tinggal.

Pada tahun 2020 sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat telah menempati rumah milik sendiri yakni sebesar 84,18 persen. Sekitar sepersepuluh rumah tangga masih harus mengontrak ataupun menyewa rumah (10,75 persen). Menempati rumah tanpa harus membayar sewa karena menempati rumah milik orang tua/sanak saudara, rumah bebas sewa dan menempati rumah dinas merupakan kedua jenis status kepemilikan rumah yang terjadi di Aceh Barat pada tahun 2020 (Gambar. 8.1.).

Gambar 8.1.
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kab. Aceh Barat, 2020



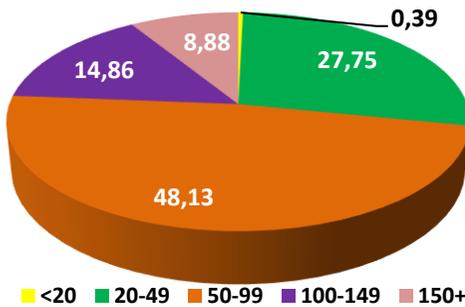
Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

8.2 Luas Lantai

Luas lantai suatu rumah selain berpengaruh terhadap kenyamanan dan kenikmatan bagi penghuninya dapat pula menggambarkan tingkat ekonomi pemilik rumah tersebut. Semakin luas lantai rumah yang dimiliki dapat berarti semakin tinggi tingkat ekonominya karena berhubungan dengan harga tanah yang semakin tinggi. Bila dikaitkan dengan kenyamanan rumah itu sendiri, hal ini jelas berpengaruh, karena dengan luas lantai yang memadai dibandingkan dengan jumlah orang yang tinggal di rumah tersebut, akan memberikan kenyamanan, namun bila luas lantai yang dimiliki tidak cukup memadai, maka akan mengakibatkan timbulnya ketidaknyamanan karena padatnya penghuni dalam suatu rumah.

Dapat dilihat pada Gambar 8.2. bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 tinggal dalam rumah dengan luasan lantai

Gambar 8.2.
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

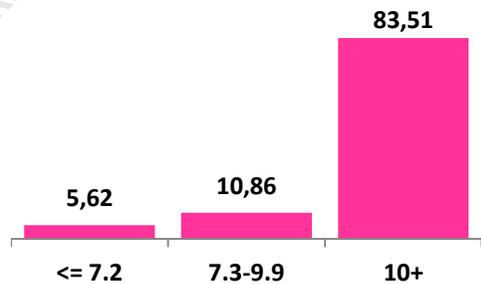
Bila melihat luas lantai rumah perkapita (Gambar. 8.3.), lebih dari 80 persen penduduk telah memiliki ruang 10 meter persegi atau lebih sehingga dapat dikatakan mempunyai tempat tinggal yang layak. Meski demikian, masih terdapat 5,62 persen penduduk yang menempati ruangan kurang dari 7,2 meter persegi. Luasan ruang 7,2 meter perkapita atau kurang dari itu, kerap disebut sebagai rumah kumuh.

8.3 Jenis Lantai, Dinding dan Atap Terlulus

Semakin maju masyarakat, maka semakin tinggi pula keinginan untuk mempunyai kondisi perumahan yang lebih baik, karena kondisi dan kualitas tempat tinggal menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Kualitas tempat tinggal, khususnya bentuk fisik dari bangunan dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu lantai, dinding dan atap.

50-99 m² sebanyak 48,13 persen, kemudian diikuti dengan luas lantai 20-49 m² sebesar 27,75 persen. Bangunan rumah dengan luas lantai kurang dari 20 m² yang ditempati oleh 0,39 persen rumah tangga menjadi porsi terkecil. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum luas lantai untuk rumah tangga yang tinggal di Kabupaten Aceh Barat sudah cukup memadai.

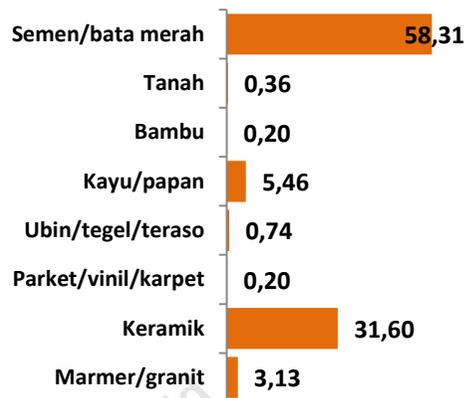
Gambar 8.3.
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah Perkapita di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

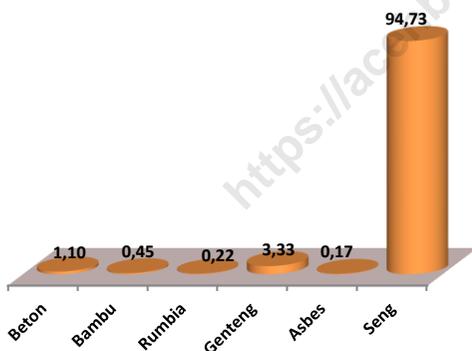
Pada tahun 2020, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat memiliki rumah dengan jenis lantai semen/bata merah, yaitu sebesar 58,31 persen. Seng merupakan jenis atap yang paling diminati oleh rumah tangga sebagai pelindung dari panas dan hujan, yaitu sebesar 94,73 persen. Sedangkan jenis dinding yang paling banyak digunakan adalah jenis tembok, yaitu sebesar 86,38 persen (Gambar 8.4., 8.5. dan 8.6.).

Gambar 8.4.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kab. Aceh Barat, 2020

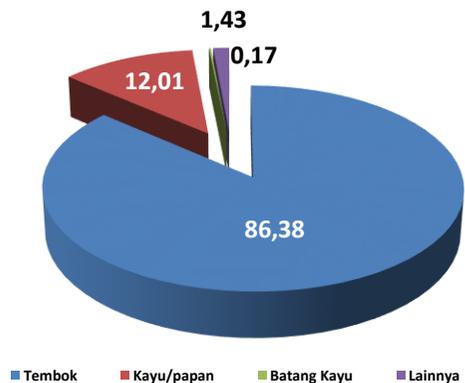


Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

Gambar 8.5.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kab. Aceh Barat, 2020



Gambar 8.6.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kab. Aceh Barat, 2020



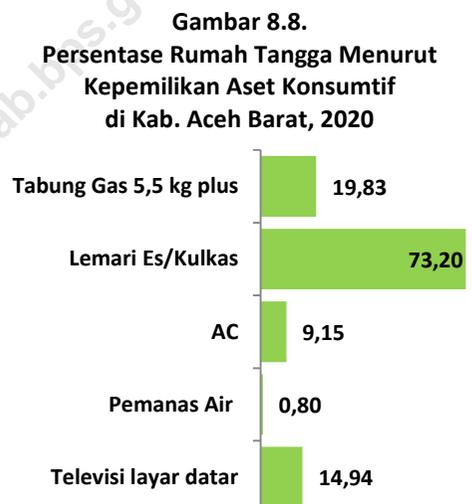
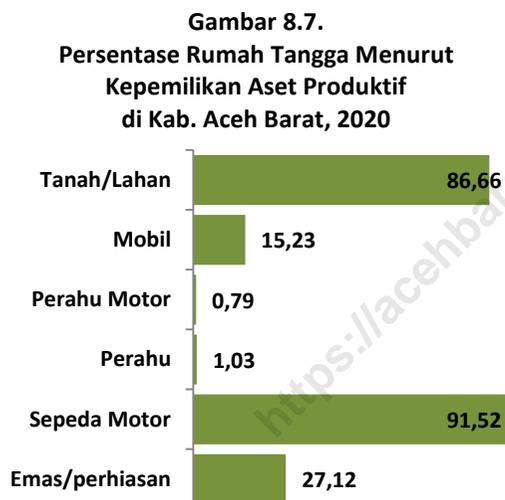
Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

8.4 Aset

Kekayaan rumah tangga (*household wealth*) mengacu pada kekayaan bersih rumah tangga, yaitu nilai aset yang dimiliki rumah tangga dikurangi semua kewajibannya. Aset rumah tangga terdiri dari aset keuangan dan aset riil. Aset juga dapat dibagi ke dalam kategori aset produktif dan aset konsumtif. Aset produktif adalah aset yang mampu menghasilkan uang

(*return*) ataupun tidak menghasilkansaat ini namun di masa depan nilainya meningkat. Sebaliknya aset konsumtif tidaklah menghasilkan serta nilainya menurun seiring waktu.

Pada tahun 2020, lebih dari empat per lima rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat memiliki aset tanah/lahan (86,66 persen) sebagai aset tetap. Sebagaimana yang sudah diyakini turun temurun, suatu lumrah bagi perempuan Aceh memiliki emas perhiasan yang sewaktu-waktu dapat dipertukarkan/diperjualbelikan sebagai aset likuid. Setidaknya 27,12 persen rumah tangga di Aceh Barat memiliki emas/perhiasan minimal 10 gram atau setara dengan 3 mayam.



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

Kemudahan pengambilan kredit kendaraan bermotor dengan uang muka dan cicilan yang ringan di Aceh Barat, maka semakin besar aset berupa mobil dan sepeda motor pribadi yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan mobil yang sudah mencapai 15,23 persen. Sementara sepeda motor, yang kepemilikannya tampak menjadi suatu keharusan tersendiri bagi rumah tangga di Aceh Barat, dimiliki 91,52 persen rumah tangga. Sementara hanya 1,82 persen rumah tangga yang memiliki aset berupa perahu/perahu motor (Gambar 8.7.).

Sebagai pelengkap peralatan mengolah dan menyimpan makanan di rumah, keberadaan tabung gas dan lemari es/kulkas pun diperlukan. Tabung gas 5,5 kg atau lebih telah ada di 19,83 persen rumah tangga di Aceh Barat. Sementara lemari es/kulkas dimiliki 73,20 persen rumah tangga (Gambar 8.8).

Dengan semakin berubahnya pola konsumsi masyarakat ke arah kesenangan/*leisure*, dan keberadaan di daerah pesisir dekat laut yang panas, adanya *Air Conditioner/AC* menjadi dianggap perlu yang dibuktikan dengan kepemilikan 9,15 persen AC di rumah tangga Aceh Barat. Sementara televisi layar datar (minimal 30 inchi) belum menjamah banyak rumah di Kabupaten Aceh Barat. Hanya 1 dari 7 rumah tangga (14,94 persen) di Aceh Barat yang telah memiliki televisi layar datar tersebut. Perangkat rumah tangga berikut yang menawarkan kesenangan yakni pemanas air (*water heater*) masih sangat sedikit diminati, hanya 0,80 persen rumah tangga.

8.5. Energi

8.5.1 Sumber Penerangan

Rumah yang sehat selain berlantai, berdinding dan beratap yang kuat/kokoh harus juga cukup udara dan cahaya matahari agar sirkulasi udara di dalam rumah tersebut berjalan lancar. Pada siang hari, diharapkan cahaya matahari yang masuk ke rumah cukup untuk menerangi rumah tersebut dan pada malam hari sumber penerangan seperti lampu ataupun yang lainnya harus mampu menjangkau ke seluruh bagian rumah agar tercipta suasana yang memberikan kenyamanan kepada penghuninya.

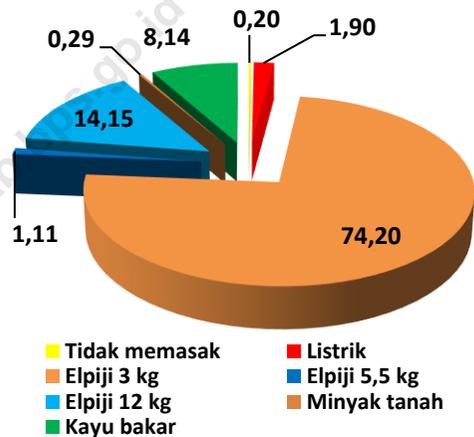
Pada saat ini, listrik PLN merupakan sumber penerangan utama di Kabupaten Aceh Barat, dengan adanya listrik PLN masyarakat di daerah ini dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang ditimbulkannya seperti kemudahan untuk menggunakan alat-alat elektronik yang membutuhkan listrik sebagai sumber tenaganya. Pada tahun 2020, sebanyak 96,11 persen rumah tangga di Aceh Barat telah menggunakan listrik PLN sedangkan sisanya 3,05 persen menggunakan Listrik PLN tanpa meteran.

8.5.2 Bahan Bakar Memasak

Pemerintah telah menyatakan keberhasilannya dalam program konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) terutama Elpiji 3 kilogram (Kg). Klaim keberhasilan itu juga tampak dari pilihan penggunaan bahan bakar memasak oleh rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020. Sebanyak 89,46 persen rumah tangga memilih menggunakan LPG (Elpiji 3 kg, Elpiji 5,5 kg, dan Elpiji 12 kg) berbanding 0,29 persen rumah tangga yang masih tetap menggunakan minyak tanah (Gambar 8.9).

Gaya hidup masyarakat perkotaan yang modern dan serba ingin praktis tercermin pada 0,20 persen rumah tangga yang memilih tidak memasak. Sebanyak 1,90 persen rumah tangga memilih listrik sebagai sumber energi untuk memasak dan masih ada 8,14 persen rumah tangga yang menggunakan kayu bakar untuk memasak.

Gambar 8.9.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat
(SUSENAS 2020)

8.6 Sumber Air

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Diperkirakan 15% penggunaan air di seluruh dunia adalah di rumah tangga. Hal ini meliputi air minum, mandi, memasak, sanitasi, dan berkebun. Kebutuhan minimum air yang dibutuhkan dalam rumah tangga menurut Peter Gleick adalah sekitar 50 liter per individu per hari, belum termasuk kebutuhan berkebun. Air minum haruslah air yang berkualitas tinggi sehingga dapat langsung dikonsumsi tanpa risiko bahaya. Di sebagian besar negara-negara berkembang, air yang disuplai untuk rumah tangga dan industri

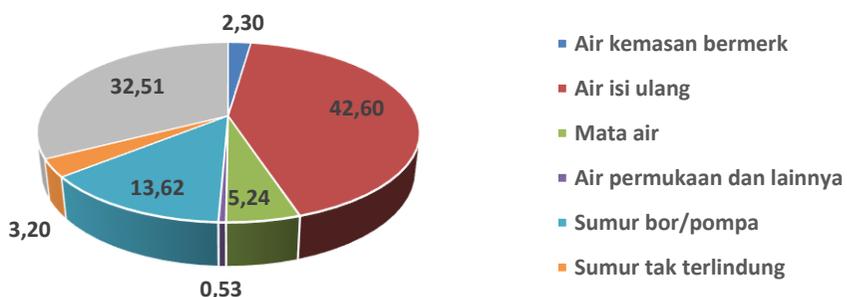
adalah air minum standar meski dalam proporsi yang sangat kecil digunakan untuk dikonsumsi langsung atau pengolahan makanan.

Kualitas air minum yang digunakan terkait kuat dengan tingkat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu pada saat mencari tempat tinggal biasanya yang menjadi perhatian utama adalah sumber air. Kebersihan dan kesehatan air minum suatu rumah tangga berpengaruh langsung kepada anggota rumah tangga yang mengkonsumsi air tersebut karena air minum merupakan kebutuhan utama manusia dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Air minum yang bersih dan sehat adalah air minum yang terbebas dari kuman-kuman penyebab timbulnya penyakit. Bila sumbernya tercemar oleh kotoran, maka dikhawatirkan air yang dihasilkannya pun akan tercemar pula.

Sebagai wilayah perkotaan dan daerah terdampak tsunami, cukup sulit menemukan sumber air yang benar-benar sehat karena permukiman warga yang semakin rapat. Selain itu, tingginya aktivitas masyarakat juga menyebabkan mereka memilih segala sesuatunya yang serba praktis. Termasuk juga dalam hal penyediaan air bersih.

Air isi ulang dan air kemasan bermerek lebih disenangi masyarakat sebagai sumber air minum karena tidak membuang waktu dan tenaga untuk memasak air. Karena faktor harga, air isi ulang lebih menjadi pilihan dibandingkan air kemasan.

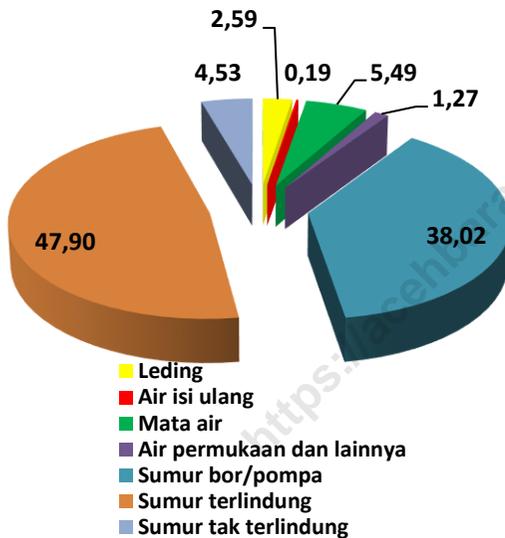
Gambar 8.10.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber: BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

Persentase rumah tangga yang menggunakan air isi ulang pada tahun 2020 sebesar 42,59 persen dan yang menggunakan air kemasan bermerek sebesar 2,30 persen (Gambar 8.10). Rumah tangga dengan sumber air minum dari sumur bor/pompa dan sumur terlindung masing-masing sebesar 13,62 persen dan 32,51 persen. Sementara sisanya bersumber dari mata air, sumur tak terlindung, air permukaan dan lainnya.

Gambar 8.11.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

Menurut Badan Pusat Statistik, air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Oleh karena itu, meski seluruh rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat telah dapat mengakses sumber air minum bersih namun hanya 29,97 persen rumah tangga yang memperoleh sumber air minum yang layak.

Penggunaan air isi ulang dan air kemasan bermerek untuk keperluan mandi dan cuci bukan lah pilihan yang ekonomis tentunya. Air bersih dari PDAM Tirta Meulaboh menjadi pilihan sebagian kecil rumah tangga. 2,59 persen rumah tangga memilih ledeng sebagai sumber Air untuk keperluan memasak/mandi/cuci/dll, 47,90 persen memilih sumur terlindung, 38,02 persen rumah tangga menggunakan sumur bor/pompa dan sisanya rumah

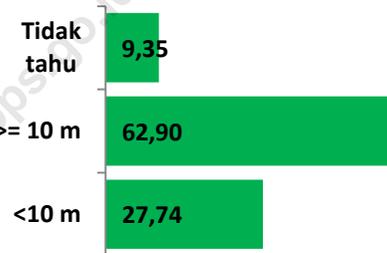
tangga menggunakan sumur tak terlindung, mata air, air isi ulang, air permukaan dan lainnya (Gambar 8.11).

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 2398:2017 tentang Tata cara perencanaan tangki septik dengan pengolahan lanjutan (sumur resapan, bidang resapan, up flow filter, kolam sanita) yang dikeluarkan Badan Standardisasi Nasional, jarak minimal sumur resapan (*septic tank*) dengan sumur air bersih adalah 10 meter, dengan bangunan atau rumah 1,5 meter, dan dengan sumur resapan air hujan 5 meter.

Penggunaan sumur baik sumur biasa (timba) ataupun sumur bor/pompa haruslah memperhatikan jarak antara sumur resapan dengan

sumur air bersih untuk keperluan mandi dan cuci. Lebih dari seperempat rumah tangga (27,74 persen) masih memiliki sumur sumber air untuk keperluan memasak/mandi/cuci/dll yang berjarak kurang dari 10 meter ke sumur penampungan limbah/kotoran/tinja. Mirisnya, terdapat 9,35 persen rumah tangga yang mengaku tidak tahu berapa jarak sebenarnya sumur sumber air untuk keperluan memasak/mandi/cuci/dll terhadap sumur penampungan limbah/kotoran/tinja (Gambar 8.12).

Gambar 8.12.
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Sumur Bor/Pompa/Sumur/Mata Air Terlindung/Tak Terlindung Untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll Menurut Jarak Sumber Air Ke Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

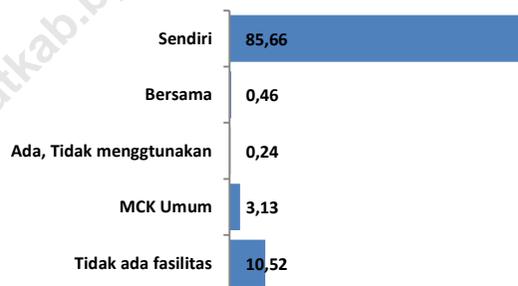
8.7 Tempat Buang Air Besar

Fasilitas penunjang kesehatan suatu rumah selain air minum dan sumber penerangan, tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan merupakan unsur penting dalam mewujudkan kenyamanan dan kesehatan suatu rumah. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik karena kotoran tidak akan mencemari

lingkungan di sekitarnya bila jaraknya dari sumber air memenuhi syarat juga. Namun tidak semua rumah mempunyai tempat buang air besar yang baik karena keterbatasan lahan maupun biaya untuk membangunnya. Oleh karena itu masih banyak rumah tangga yang membuang kotorannya ke tempat-tempat yang tidak seharusnya seperti ke sungai, kolam, sawah ataupun tanah terbuka. Keadaan ini tentunya perlu mendapat perhatian karena dapat mencemari lingkungan dengan bau dan pencemaran lain yang ditimbulkannya.

Pada Gambar 8.13, terlihat bahwa fasilitas buang air besar yang digunakan oleh rumah tangga sebagian besar adalah milik sendiri, yaitu sebanyak 85,66 persen, fasilitas buang air besar digunakan bersama rumah tangga tertentu penggunaannya sebesar 0,46 persen, sedangkan 10,52 persen rumah tangga tidak ada fasilitas buang tempat buang air besar dan sisanya di MCK umum atau ada jamban tapi tidak menggunakannya.

Gambar 8.13.
Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

Sanitasi rumah tangga yang baik merupakan salah satu ciri rumah tangga yang sehat, tempat pembuangan akhir tinja yang baik merupakan gambaran sanitasi rumah tangga yang baik. Jenis kloset leher angsa merupakan jenis kloset terbaik ditinjau dari aspek kesehatan karena kloset jenis leher angsa mampu menahan bau yang dapat dikeluarkan oleh kotoran manusia. Pada Tahun 2020 sebanyak 99,30 rumah tangga di Aceh Barat menggunakan kloset jenis leher angsa dengan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki/spal sedangkan lainnya menggunakan plengsengan dengan tutup atau cubluk.



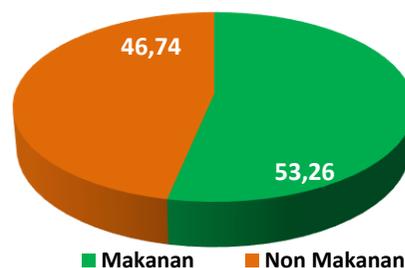
BAB IX KONSUMSI DAN PENGELUARAN

Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah aspek pendapatan, tingkat konsumsi dan pola konsumsi. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besarnya tingkat dan pola konsumsi.

Adanya peningkatan pendapatan biasanya akan diikuti oleh pertumbuhan pola dari komposisi pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan (*Engel's Law*). Hal tersebut terkait dengan tingkat kepuasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan akan makanan merupakan syarat minimum untuk setiap individu bertahan hidup namun pemenuhan kebutuhan makanan akan mencapai kepuasan maksimum pada tingkat tertentu atau adanya titik kejenuhan sehingga pengeluaran makanan juga akan terbatas sampai titik jenuh tersebut. Berbeda dengan kebutuhan akan non makanan yang tak terbatas atau tidak ada titik jenuhnya, sehingga setelah kebutuhan akan makanan terpenuhi tentunya kenaikan pendapatan akan lebih cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk konsumsi makanan masih relatif besar (mendekati 50 persen) dari total

Gambar 9.1.
Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita
Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan
di Kab. Aceh Barat, 2020

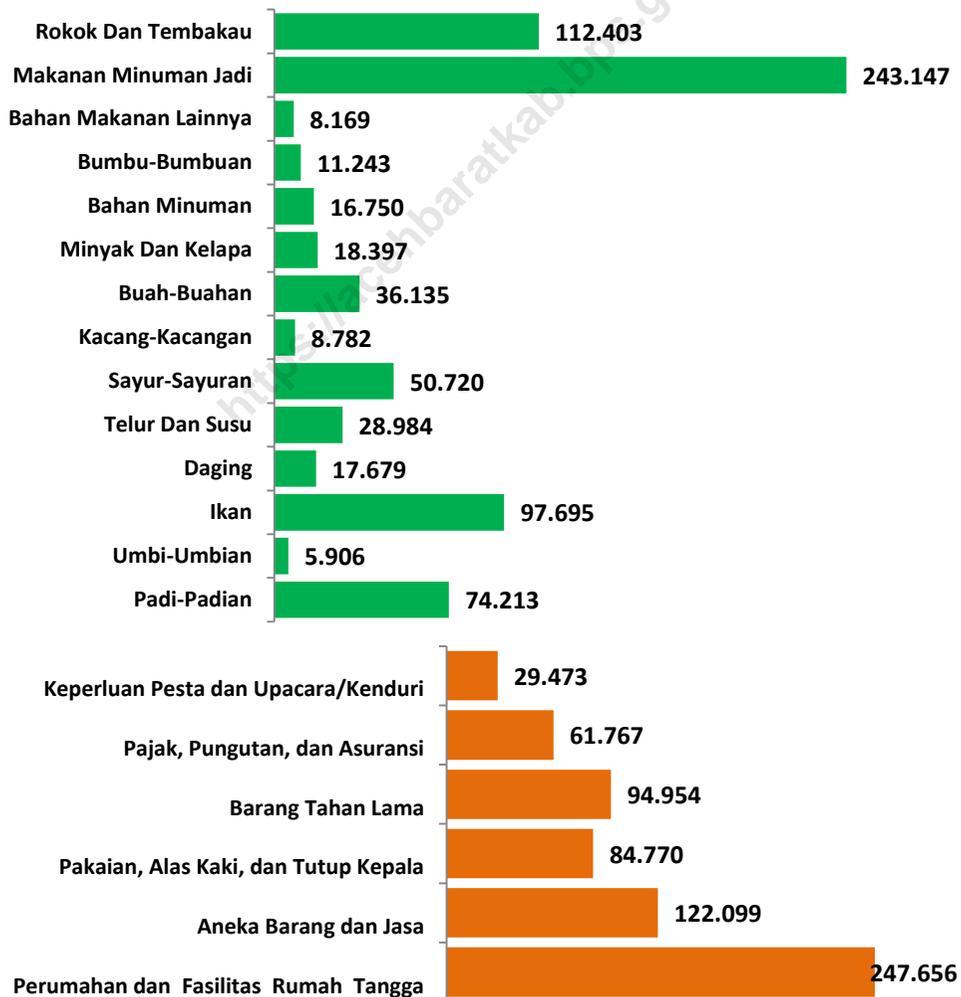


Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

pengeluaran perkapita. Sebaliknya pada negara maju pengeluaran perkapita yang bersifat sekunder seperti aneka barang dan jasa yang mencakup pengeluaran untuk perawatan kesehatan, rekreasi, olah raga, pendidikan dan lain-lain, adalah bagian terbesar dari pengeluaran perkapita.

Pada tahun 2020, perbandingan komposisi pengeluaran makanan dan non makanan di Kabupaten Aceh Barat sedikit berbeda dimana pengeluaran makanan sebesar 46,74 persen dan pengeluaran non makanan sebesar 53,26 persen (Gambar 9.1).

Gambar 9.2.
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan di Kab. Aceh Barat (Rupiah), 2020



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

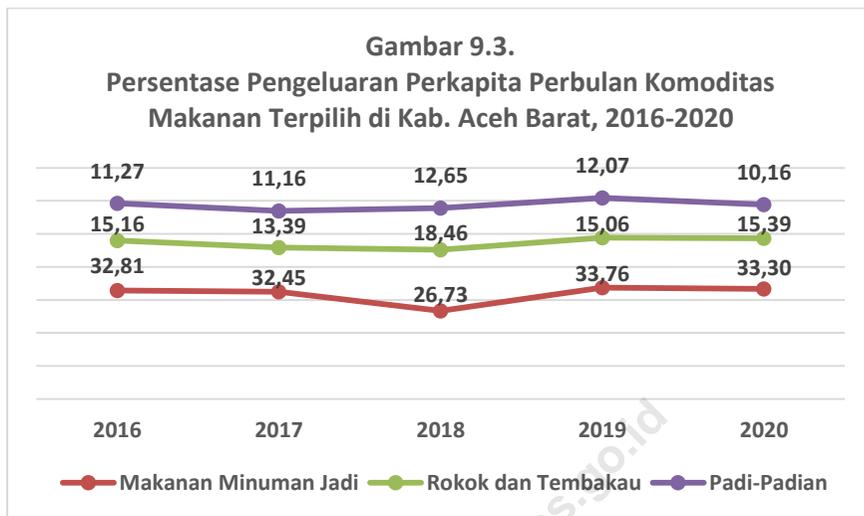
9.1. Pengeluaran Konsumsi Kelompok Makanan

Banyak faktor yang memengaruhi pola konsumsi pangan rumah tangga. Menurut Hattas, faktor-faktor yang memengaruhi pola konsumsi, di antaranya adalah : (1) Tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendapatan biasanya sebanding dengan tingkat konsumsi yang tinggi; (2) Selera konsumen, orang berbeda akan memiliki keinginan yang berbeda dan akan memengaruhi pola konsumsi; (3) Harga barang, kenaikan harga berbanding terbalik dengan permintaan akan suatu barang; (4) Tingkat pendidikan masyarakat, berpengaruh terhadap perilaku, sikap dan kebutuhan konsumsi; (5) Jumlah keluarga. Besar kecilnya jumlah keluarga akan memengaruhi pola konsumsinya; (6) Lingkungan. Keadaan dan kebiasaan lingkungan akan memengaruhi perilaku konsumsi pangan masyarakat setempat.

Bagi masyarakat Aceh Barat khususnya di Meulaboh telah terjadi pergeseran pola pengeluaran konsumsi perkapita. Gaya hidup yang ingin instan tanpa perlu menghabiskan waktu dan tenaga serta didukung oleh kemudahan sistem pelayanan pembelian melalui pesan antar secara daring/*online* telah menyebabkan pengeluaran makanan dan minuman jadi semakin meningkat.

Dapat dilihat pada Gambar 9.3, pengeluaran perkapita perbulan untuk pengeluaran makanan dan minuman jadi cenderung terus meningkat selama lima tahun terakhir kecuali di tahun 2018. Bila di tahun 2016 seorang penduduk di Kabupaten Aceh Barat baru mengalokasikan 32,81 persen bagian dari pengeluaran perkapita perbulannya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman jadi, alokasi ini meningkat menjadi 33,30 persen di tahun 2020.

Secara spesifik, peningkatan terbesar tampak di tahun 2019. Peningkatan yang terjadi sampai 0,95 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini terjadi karena mulai beroperasinya salah satu operator transportasi *online* lokal yang salah satu pelayanan yang diberikan adalah layanan antar pembelian *online*, suatu bentuk kerjasama antar operator transportasi *online* dengan berbagai warung/kedai/restoran makanan dan minuman.



Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, 2017-2021

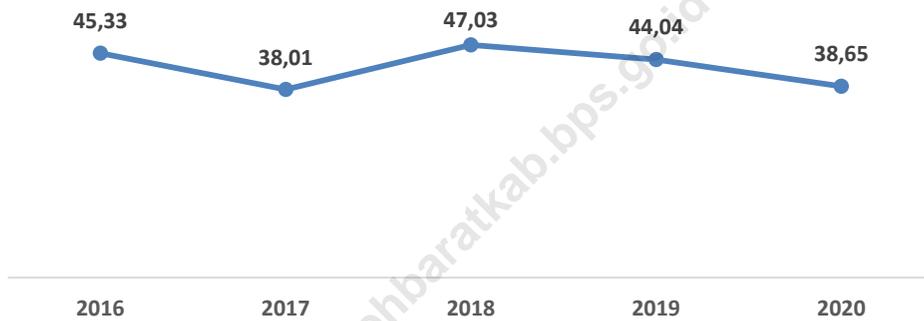
Pada periode yang sama, konsumsi padi-padian (padi, jagung, ubi, tepung) justru mengalami penurunan. Patut diduga alokasi untuk jenis komoditas makanan telah bergeser menjadi pengeluaran makanan dan minuman jadi. Sementara pengeluaran konsumsi rokok dan tembakau cenderung fluktuatif. Proporsi konsumsi rokok ini secara umum di tiap tahunnya lebih besar dibandingkan dengan konsumsi padi-padian. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh Barat khususnya penduduk laki-laki cenderung lebih banyak menghabiskan uangnya untuk merokok dibandingkan untuk keperluan makan nasi, jagung, ubi atau tepung.

9.2. Pengeluaran Konsumsi Kelompok Non Makanan

Sejalan dengan kenaikan pendapatan per kapita, pola konsumsi berubah sehingga : (1) Pengeluaran rumahtangga untuk bahan makanan dan pakaian turun; (2) Belanja untuk barang konsumsi tahan lama meningkat; (3) Pengeluaran untuk jasa meningkat; (4) Pengeluaran untuk *leisure* meningkat.

Pengeluaran Konsumsi Non Makanan biasanya mengalami kenaikan sejalan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tingginya proporsi pengeluaran untuk non makanan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan semakin membaik. Pengeluaran untuk makanan memiliki limitasi karena tidak mungkin perut seseorang terus bertambah seiring kenaikan pendapatan.

Gambar 9.4.
Persentase Pengeluaran Perkapita Perbulan
Kelompok Pengeluaran Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga
di Kabupaten Aceh Barat, 2016-2020



Sumber: Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

Kebutuhan pengeluaran masyarakat Kabupaten Aceh Barat terhadap perumahan dan fasilitas rumah tangga dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Tercatat di tahun 2016 pengeluaran per kapita untuk komoditas tersebut adalah 45,33 persen yang selanjutnya turun menjadi 38,01 persen. Namun di tahun 2018 kebutuhan untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga berada di puncak tertinggi yaitu sebesar 47,03 persen dan di tahun 2020 proporsinya turun drastis menjadi 38,65 persen.

BAB X KEMISKINAN



Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya.

Dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu lainnya, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

10.1 Garis Kemiskinan

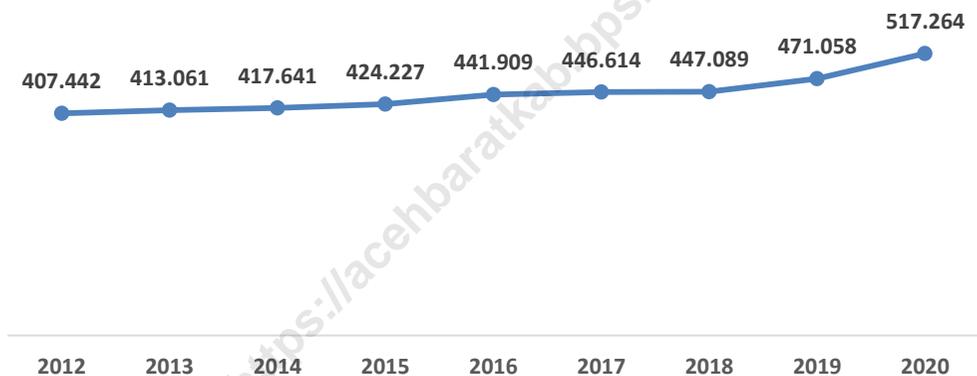
Garis Kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis Kemiskinan menurut BPS merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Non-Makanan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per

kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

Gambar 10.1.
Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat (Rupiah), 2012-2020



Sumber : Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

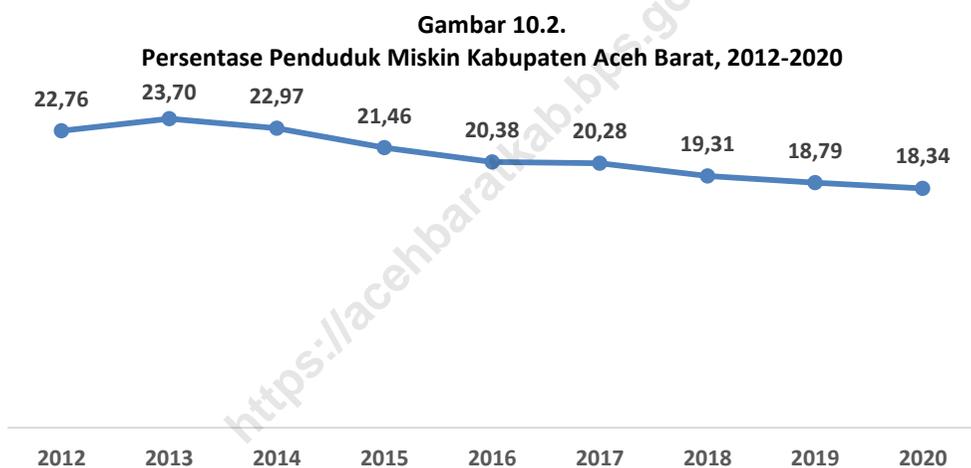
Garis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 garis kemiskinan sebesar Rp. 407.442,-. Selama kurun waktu sembilan tahun, garis kemiskinan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 517.264,- pada tahun 2020. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan minimum perkapita perbulan yang harus dicapai penduduk untuk dapat hidup layak adalah sebesar 517.264 rupiah pada tahun 2020 (Gambar 10.1.).

Meningkatnya garis kemiskinan disebabkan oleh inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Untuk memperoleh standar hidup yang layak maka

daya beli masyarakat tidak boleh turun. Agar daya beli masyarakat tidak turun maka pendapatan harus naik sehingga garis kemiskinan juga naik.

10.2 Persentase Kemiskinan

Konsep kemiskinan menurut BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan.



Sumber : Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021

Persentase penduduk miskin selama sembilan tahun terakhir menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan. Pada tahun 2012, persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat sebesar 22,76 persen. Persentase penduduk miskin terus mengalami kenaikan setahun kemudian menjadi 23,70 persen. Selanjutnya mulai tahun 2014 hingga 2020, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan dari 22,97 persen menjadi 18,34 persen (Gambar 10.2).



BAB XI SOSIAL EKONOMI LAINNYA

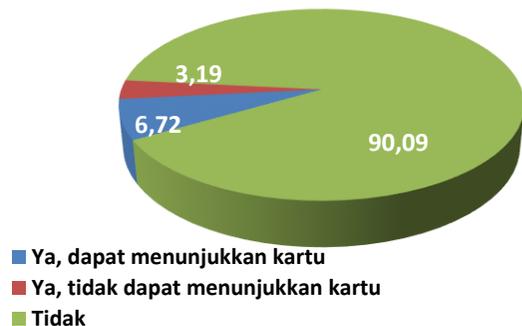
Keadaan sosial ekonomi masyarakat dapat pula dilihat dari beberapa hal yang berkaitan dengan kesejahteraan, antara lain rumah tangga yang mendapat pelayanan kesehatan gratis, pemberian bantuan tunai pendidikan terkait Program KIP (Kartu Indonesia Pintar), bantuan non tunai KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) untuk keluarga kurang mampu dan bantuan kredit usaha.

11.1 Perlindungan Sosial

11.1.1 Jaminan Kesehatan

Penerbitan kartu pelayanan kesehatan secara gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di bidang kesehatan. Meski demikian, 90,09 persen rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat mengaku tidak menerima Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (Gambar 11.1.).

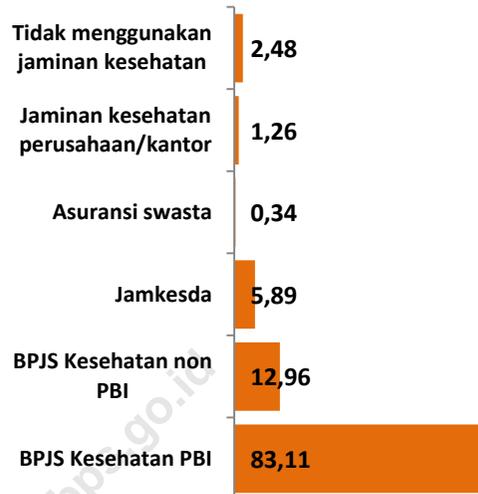
Gambar 11.1.
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 mengaku memiliki BPJS Kesehatan PBI sebagai jaminan kesehatan yang dimiliki yakni 83,11 persen (Gambar 11.2). Adapun BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan non PBI (Penerima Bantuan Iuran) dimiliki oleh 12,96 persen penduduk. Secara keseluruhan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan telah mencakup 96,07 persen penduduk Aceh Barat di tahun 2020.

Gambar 11.2.
Persentase Penduduk Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (Susenas 2020)

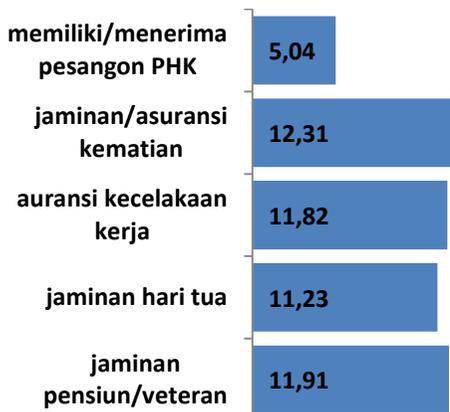
11.1.2 Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi

PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. Jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pemerintah harus terlibat dalam menyejahterakan warga negaranya.

Bagian terbesar rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020, yakni 12,31 persen, menyatakan

Gambar 11.3.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Jaminan Sosial yang Dimiliki di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (Susenas 2020)

bahwa jaminan/asuransi kematian merupakan jenis jaminan sosial yang mereka miliki. 11,91 persen rumah tangga juga menyatakan memiliki/menerima jaminan sosial berupa jaminan pension/veteran; asuransi kecelakaan kerja dimiliki 11,82 persen rumah tangga; jaminan hari tua sebanyak 11,23 persen dimiliki rumah tangga dan kurang dari 6 persen rumah tangga yang menyatakan memiliki/menerima pesangon PHK. (Gambar 11.3).

11.1.3 Jaminan Pendidikan

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Pada tahun 2020, terdapat 15,93 persen rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat yang menerima PIP. Alokasi terbanyak untuk penerima PIP adalah untuk anggota rumah tangga yang masih duduk di bangku SD/ sederajat, yakni sekitar 76,72 persen. Secara umum, alokasi penerima PIP dengan pendidikan yang semakin rendah cenderung semakin besar alokasi dana bantuan yang diterima.

Tabel 11.1.
Persentase Rumah Tangga yang ART-nya Menerima PIP Menurut Jenis PIP di Kab. Aceh Barat, 2020

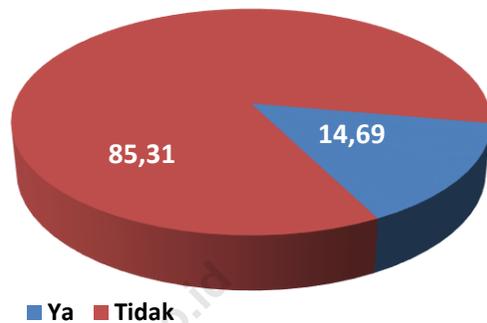
Tahun	2020
(1)	(2)
Menerima PIP	15,93
- PIP SD/ sederajat	76,72
- PIP SMP/ sederajat	16,86
- PIP SMA/ sederajat	19,94
Tidak Menerima PIP	84,07

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

11.1.4 Kemudahan Pembiayaan

Kredit atau pinjaman merupakan hal klasik yang dilakukan dan diperlukan oleh banyak orang serta ditemui di setiap strata masyarakat. Beberapa orang mengambil kredit untuk keperluan investasi dan sebagian lainnya memang menggunakan kredit untuk keperluan konsumsi. Terdapat sebanyak 14,69 persen rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 yang mengaku telah menerima kredit (Gambar 11.4.).

Gambar 11.4.
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Selama Setahun Terakhir di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (Susenas 2020)

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKMK, dan reformasi regulasi UMKMK. Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Dengan berbagai sebab, KUR belum menjadi pilihan utama rumah tangga dalam memperoleh pembiayaan melalui kredit. Sebagian besar rumah tangga lebih memilih untuk memperoleh kredit dari Bank Umum selain KUR, yakni sebesar 25,86 persen dan dari koperasi sebesar 9,96 persen (Gambar. 11.5.).

Gambar. 11.5.
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (Susenas 2020)

Program KUR menjadi pilihan ketiga yakni sebesar 9,74 persen. Sementara pinjaman dari perusahaan menjadi pilihan berikutnya sebesar 7,20 persen. Patut dicermati bahwa masih terdapat rumah tangga belum menggunakan jasa lembaga keuangan yang dikelola oleh pegadaian maupun kredit dari perorangan dengan menerapkan bunga terhadap jasa pinjaman diberikan.

11.2 Teknologi Informasi

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat akan komunikasi dan akses informasi semakin berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia menggunakan berbagai jenis sarana komunikasi seperti surat, email, telepon, internet, dll. Perbedaan ruang dan waktu tidak lagi menghambat seseorang untuk memperoleh informasi. Kini kita dapat tetap saling terhubung tidak peduli belahan dunia manapun kita berada.

Gaya hidup modern menuntut kita untuk selalu terhubung dengan lingkungan sekitar, terutama melalui internet. Wajar bila perangkat elektronik seperti laptop dan telepon genggam pribadi dengan fitur yang canggih menjadi kebutuhan pada masa kini bagi mereka yang mengadopsi gaya hidup modern.

Melalui internet, mereka yang mengadopsi gaya hidup modern dapat dengan leluasa mencari sekaligus mendapatkan informasi mengenai peristiwa

penting yang terjadi di dunia ataupun topik perbincangan terkini yang perlu diketahui.

Tabel 11.2.
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas
Menurut Penggunaan Telepon
Seluler/Nirkabel, Komputer, dan Internet di
Kab. Aceh Barat, 2020

Tahun	L	P	Total
(1)	(4)	(5)	(6)
Telepon Seluler/Nirkabel			
-Menggunakan	83,98	73,06	78,60
-Memiliki/Menguasai	69,90	55,37	62,75
Menggunakan Komputer	11,32	13,42	12,35
Mengakses internet	51,44	40,96	46,28

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

di bawah umur yang tidak memiliki telepon seluler memiliki keluasaan menggunakan telepon seluler milik orang tua atau kerabat mereka.

Sebanyak 12,35 persen penduduk Kabupaten Aceh Barat yang berumur 5 tahun ke atas mengaku telah menggunakan komputer. Sedangkan 46,28 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas telah pernah mengakses internet. Akses internet tentunya dapat dilakukan melalui telepon seluler ataupun komputer.

Hal ini juga dipengaruhi oleh keberadaan komputer/laptop di rumah tangga. Sebanyak 21,95 persen rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 mengaku memiliki komputer atau laptop di rumah mereka (Gambar 11.6).

Sementara telepon seluler semakin merasuki rumah-rumah di Aceh Barat, keberadaan telepon rumah (*Public Switch Telephone Network/PSTN*)

Pada tahun 2020, terdapat 78,60 persen penduduk Kabupaten Aceh Barat yang berumur 5 tahun ke atas telah mengaku telah menggunakan telepon seluler/nirkabel. Kondisi tersebut lebih tinggi dari persentase penduduk yang mengakui bahwa mereka telah memiliki/menguasai telepon seluler/nirkabel yakni sebanyak 62,75 persen (Tabel 11.2.). Hal ini bisa saja terjadi karena banyak anak

Gambar. 11.6.
Persentase Rumah Tangga yang
Memiliki Telepon Rumah dan
Komputer/Laptop di Kab. Aceh Barat,
2020



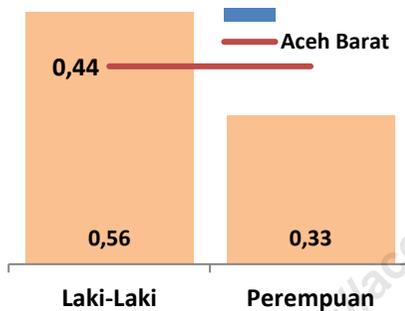
Sumber : BPS Kab. Aceh Barat (SUSENAS 2020)

semakin ditinggalkan. Hanya 0,25 persen rumah tangga yang masih menggunakan telepon rumah.

11.3 Kriminalitas

Hampir setiap hari tindakan kriminal terjadi. Semua terpampang jelas di berbagai media massa mulai cetak sampai elektronik. Pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan entah apalagi. Pelakunya bukan hanya orang dewasa tapi juga anak-anak usia sekolah.

Grafik. 11.7.
Persentase Penduduk Pernah
Menjadi Korban Kejahatan
di Kab. Aceh Barat, 2020



Sumber : BPS Kab. Aceh Barat
(Susenas 2020)

Terdapat 0,44 persen penduduk Kabupaten Aceh Barat di tahun 2020 yang mengaku pernah menjadi korban kejahatan dimana persentase penduduk laki-laki yang menjadi korban masih lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. 0,56 persen penduduk laki-laki mengaku menjadi korban kejahatan sementara terdapat 0,33 persen penduduk perempuan yang mengaku menjadi korban kejahatan (Gambar 11.7).

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ACEH BARAT**

Jl. Sisingamangaraja No.2 Meulaboh
Telp. : (0655) 7553330 Email : bps1107@bps.go.id
Homepage : <http://www.acehbaratkab.bps.go.id>